



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2025

# Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-V pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, 4 Maret 2025



**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**

**Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2022-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang dihasilkan di tahun 2024, dapat disimpulkan capaian kinerja rata-rata sebesar **109,60%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian **Sangat Berhasil**, sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar  
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	KRETERIA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	%	116,5	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP	Nilai	101	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP	Nilai	117,61	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Resiko (MR)	Nilai MR	Nilai	112,87	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah $\geq$ 90%	%	100	Sangat Baik
<b>Nilai Capaian Kinerja Rata-rata</b>				<b>109,60%</b>	

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Sumenep ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
1.4 Landasan Hukum .....	5
1.5 Sistematisa Penyusunan .....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun .....	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2. Realisasi Anggaran .....	98
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111
BAB IV PENUTUP .....	114
Lampiran :	
1. SK. Tim SAKIP Perangkat Daerah	
2. Matriks RENSTRA	
3. SK. Penetapan Indikator Kinerja Utama	
4. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	
5. SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja	
6. Catatan Hasil Reviu LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2025	
7. Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Reviu LKjIP Tahun Anggaran 2024	

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep
2. Mendorong BAPPEDA Kabupaten Sumenep di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

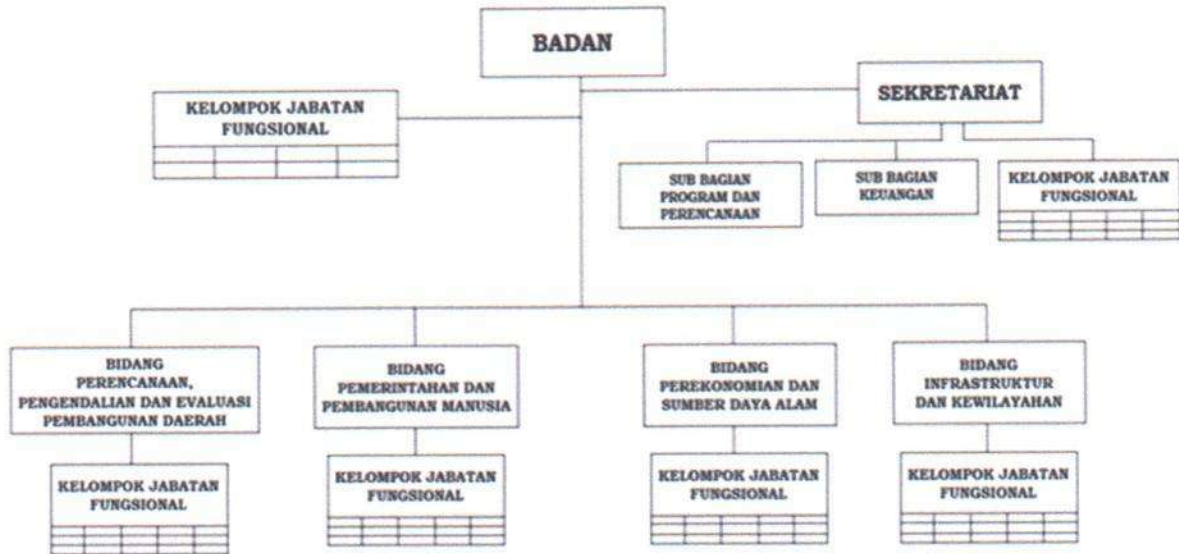
Berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, Bappeda Kabupaten Sumenep masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Bappeda berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*.

Adapun susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 72 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



— - - - - GARIS KOMANDO

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

**1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berbagai isu strategis berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu-isu strategis, terlebih dahulu melalui identifikasi permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga permasalahan tersebut dapat dikontrol oleh Perangkat Daerah. Hal ini karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 3.6*  
*Penentuan Isu-Isu Strategis*

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	1. Keselarasan dan konsistensi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah antar perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2.	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	

#### 1.4. Landasan Hukum

1. Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;

7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

# Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### 2.1. Rencana Strategis

Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

#### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan

kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke empat. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Sumenep yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep, maka Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yakni: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

#### **UNGGUL**

*Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.*

#### **MANDIRI**

*Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.*

#### **SEJAHTERA**

*Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.*

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel : 2.1.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2021 - 2026  
Visi: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1 Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Pengeluaran Perkapita
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Prosentase Penduduk Miskin	Menurunkan Kesenjangan	Indeks Gini
			Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Petumbuhan PAD
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
				PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovati	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
				Nilai IKM
				Indeks Inovasi Daerah
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
				Opini atas Audit BPK
			Tingkat Maturitas SPIP	
4 Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal	Indeks Kesalahan Sosial	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Nilai Stabilitas Sosial
			Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	Nilai Solidaritas Sosial
			Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong
5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Indeks Infrastrukturu
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Sumenep berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: meningkatnya pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan indikator capaian sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep  
Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>RENSTRA AWAL</b>								
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	91,50%	92%	-	-	-
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%	84%	-	-	-
1.2		Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%	87%	-	-	-
<b>RENSTRA PERUBAHAN</b>								
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah		Nilai Perencanaan Kinerja	25,00	25,00	25,00	25,50	25,50
1.1		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	80,10%	80,15%	80,25%	80,50%	80,75%

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2  
Indikator Kinerja Utama  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep  
Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formulasi
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah		Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	Penilaian AKIP: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan Kinerja (30,00)</li> <li>▪ Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6,00)</li> <li>▪ Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) pada setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9,00)</li> <li>▪ Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15,00)</li> </ul>
1.1		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	%	Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% Capaian Sasaran Pemkab + 20% Sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Program Perangkat Daerah

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen RENJA perangkat daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 :

Tabel 2.2.1  
Rencana Kerja Tahunan  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep  
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	80,15%	80,25%	Meningkatnya Capaian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target	100%	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 55.448.494
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22.211.800
								Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 285.645.050
								Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 11.258.800

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
								Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 7.203.300
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 30.528.900
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 26.094.100
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 571.530.524
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 81.354.200
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 654.383.800
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 64.567.494
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 268.528.606
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 7.546.700
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 63.206.994
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 25.624.200

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 7.456.100
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 49.028.894
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 16.650.400
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 6.516.400
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 81.202.694
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 19.227.800
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 6.536.600
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 87.294.285
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 14.220.860
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 2.635.100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 100.980.400
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 87.546.535
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 14.069.200
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.827.300
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 101.067.150
				Meningkatnya capaian kinerja sasaran program pada PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program > 90%	95%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.569.400
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.057.200
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 925.400
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 925.400
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 925.400
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.635.300
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.705.700
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.516.262.237
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.721.700

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 10.852.700
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 49.657.000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp 30.000.000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.017.961
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 80.002.004	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp 261.314.289	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp 16.854.690	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp 155.314.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 305.244.000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp 212.894.453	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.525.000
								Pengadaan Mebel	Rp 60.509.541
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 330.246.795	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 232.304.550	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 300.927.747	
							Pemeliharaan Mebel	Rp 6.660.000	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 55.186.294	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 334.160.658	
<b>TOTAL APBD</b>									<b>Rp 10.795.792.099</b>

### 2.3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 23 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan September tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan:

Tabel 2.3.1  
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah  
Perubahan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
<b>PERJANJIAN KINERJA AWAL</b>				
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Bobot Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	25	-
		Nilai Bobot Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	21	-
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	88%	-
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA	≥ 90%	-
<b>PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN</b>				
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Perencanaan</b>	-	<b>80,25%</b>
	<i>Kinerja Tambahan Pendukung Sasaran Strategis :</i>		-	
-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP	-	90
-	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP	-	3,18
-	Meningkatnya Kualitas Manajemen Resiko (MR)	Nilai MR	-	3,03
-	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah ≥ 90%	-	100%

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 :

Tabel 2.3.2  
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Sesudah Perubahan  
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>27,95 (Nilai Perencanaan SAKIP)</b>	<b>6.776.730.457</b>	<b>8.023.399.419</b>
		<b>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>27,05 (Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP)</b>		
		<b>Nilai Komponen Pelaporan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>14 (Nilai Pelaporan SAKIP)</b>		
		<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program &gt;</b>	<b>95%</b>		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		<b>90%</b>			
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program &gt; 90%</b>	<b>95%</b>	<b>11.743.800</b>	<b>11.743.800</b>
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Lengkap Dan Tepat Waktu	7 Dokumen	2.569.400	2.569.400
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.057.200	1.057.200
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			925.400	925.400
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			925.400	925.400
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			925.400	925.400
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.635.300	1.635.300
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.705.700	3.705.700
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Diproses Sesuai Ketentuan Tuntas Dan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.992.098.387</b>	<b>5.528.836.637</b>
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Dikoordinasikan Dan Ditindaklanjuti Tuntas</b>	<b>100%</b>		
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengajuan pemberian gaji/tunjangan disusun sesuai ketentuan dan tersampaikan tepat waktu	100%	4.979.523.987	5.516.262.237
		Persentase pemberian gaji/tunjangan disalurkan tepat waktu	100%		
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen pengelolaan keuangan harus disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	1.721.700	1.721.700
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan ditindaklanjuti tuntas	100%	10.852.700	10.852.700
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>79.657.000</b>
1	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Pengajuan Kenaikan Pangkat/Pensiun Disusun Sesuai Ketentuan Dan Tersampaikan Tepat Waktu	100%	30.000.000	49.657.000
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>959.190.087</b>	<b>1.052.641.397</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan SKM Per Triwulan/Semester	4 Laporan	16.371.945	21.017.961
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.948.016	80.002.004
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			146.976.918	261.314.289

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.650.340	16.854.690
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			322.854.400	155.314.000
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			185.494.000	305.244.000
7	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			212.894.468	212.894.453
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Infentaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya</b>	<b>100%</b>	<b>75.679.270</b>	<b>421.281.336</b>
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	30.525.000
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel			-	60.509.541
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.679.270	330.246.795
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>232.304.550</b>	<b>232.304.550</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan SKM Per Triwulan/Semester	4 Laporan	232.304.550	232.304.550
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Infentaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya</b>	<b>100%</b>	<b>475.714.363</b>	<b>696.934.699</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Dokumen Kartu Infentaris Barang (KIB)	4 Dokumen	292.847.768	300.927.747
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	- Persentase Aset Terinfentarisir Dalam KIB	100%	-	6.660.000
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Persentase Aset Yang Memerlukan Pemeliharaan/Perawatan Dilakukan Sebagaimana Mestinya	100%	49.258.894	55.186.294
4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			133.607.701	334.160.658
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>1.630.081.504</b>	<b>1.745.658.968</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>816.683.210</b>	<b>932.260.674</b>
1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah OPD Yang Memiliki Dokumen Perencanaan Baik	3 Dokumen	11.258.800	11.258.800
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			7.203.300	7.203.300
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			30.528.900	30.528.900
4	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			76.038.500	26.094.100

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			406.008.660	571.530.524
6	Sub Kegiatan :Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			285.645.050	285.645.050
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase data prioritas sektoral yang tersedia sesuai kaidah</b>	<b>100%</b>	<b>77.660.294</b>	<b>77.660.294</b>
1	Sub Kegiatan :Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Menyampaikan Data Capaian Kinerja (IKU) Tepat Waktu	55 PD	55.448.494	55.448.494
2	Sub Kegiatan :Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terverivikasi	1 Data	22.211.800	22.211.800
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>735.738.000</b>	<b>735.738.000</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terukur	4 Dokumen (Renja)	81.354.200	81.354.200
2	Sub Kegiatan :Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD Yang Melaporkan Capaian Kinerja Renja PD Tepat Waktu	10 Laporan	654.383.800	654.383.800
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>830.444.306</b>	<b>1.026.763.712</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>220.224.688</b>	<b>436.960.094</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	64.597.494	64.597.494
2	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	1 Dokumen	38.693.200	268.528.606
3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			7.546.700	7.546.700
4	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			63.206.994	63.206.994

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			38.724.200	25.624.200
6	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			7.456.100	7.456.100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>189.162.788</b>	<b>179.162.788</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen	43.592.694	49.028.894
2	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang disusun	1 Dokumen	28.450.400	16.650.400
3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			6.516.400	6.516.400
4	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			72.738.894	81.202.694
5	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam			31.327.800	19.227.800
6	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam			6.536.600	6.536.600
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>421.056.830</b>	<b>410.640.830</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	87.294.285	87.294.285
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	1 Dokumen	19.428.860	14.220.860

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2.635.100	2.635.100
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			100.980.400	100.980.400
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			87.546.535	87.546.535
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			19.277.200	14.069.200
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			2.827.300	2.827.300
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			101.067.150	101.067.150

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BAPPEDA Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

#### 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan

membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024

NO	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATAGORI	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah	1.1. Nilai Perencanaan Kinerja	%	25,00	24,72	98,88	Sangat Baik	Bidang Dalev

1) Uraian Penjelasan Capaian Kinerja (Tabel 3.1.1):

1. Nilai Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun RPJMD periode 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) PD, PK Bupati maupun PD tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan pohon kinerja dari level kabupaten hingga PD sesuai dengan isu strategis. Adapun pohon kinerja diinput melalui aplikasi SIMPEL dan sudah ada langkah dalam memanfaatkan pohon kinerja untuk diterjemahkan dalam PK tahun 2024. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan target kinerja cenderung stagnan/tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga belum sepenuhnya menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik. Sebagai contoh:
  - Pada dokumen RPJMD, target indikator “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD” pada tahun 2022 sampai 2026 sebesar 0,06;
  - Pada dokumen renstra Dinas Kesehatan P2KB, target indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada tahun 2022 sampai 2026 sebesar 85.
- b. Perbaikan pohon kinerja atau penjenjangan kinerja sudah dilakukan diantaranya dengan menjabarkan kondisi kinerja level strategis sampai level operasional. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumenep juga sudah berupaya dalam memanfaatkan pohon kinerja

Kabupaten dan PD untuk diterjemahkan ke dalam PK Bupati, PK Kepala Dinas hingga PK Eselon III. Namun, masih terdapat kinerja pada level taktikal sampai ke operasional belum sepenuhnya mengawal kondisi kinerja di atasnya serta belum dilengkapi dengan indikator yang relevan. Sebagai contoh:

- Kinerja “terlaksananya pemantauan keamanan bahan pangan segar di pasar/kios” dengan indikator “persentase pasar yang dimonitoring keamanan PSAT’ pada pohon kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - Kinerja “pengendalian dan pendistribusian ALKON” dengan indikator “persentase fasilitas kesehatan yang teregister terfasilitasi”.
- c. Dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Sumenep telah memetakan faktor-faktor kunci yang dapat membantu untuk menurunkan kemiskinan yang dituangkan dalam pohon kinerja. Namun, masih ditemukan beberapa titik penurunan kinerja yang kurang menggambarkan hubungan logis atau sebab-akibat yang secara langsung menunjang kinerja atasnya. Selain itu ditemukan kinerja yang belum mengeksplorasi alternatif solusi atau Critical Success Factor (CSF) yang cukup untuk pencapaian kinerja. Sebagai contoh:
- Kinerja “meningkatnya kualitas pemuda yang unggul dan berprestasi” dengan indikator % peningkatan pemuda yang unggul dan berprestasi yang menjadi CSF langsung kondisi di atasnya berupa “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”. Kinerja tersebut diukur dari jumlah pemuda aktif dalam organisasi dan pemuda yang menghasilkan karya dan menang kejuaraan, bukan dari pemuda yang berwirausaha atau berkegiatan ekonomi, sehingga dirasa kurang menggambarkan hubungan logis atau sebab-akibat yang secara langsung menunjang kinerja atasnya;
  - Kinerja “meningkatnya penanganan stabilisasi dan harga pangan”, hanya diidentifikasi 1 CSF saja yang mendukung yaitu

- “tersedianya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM)”. Hal ini dirasa belum mengeksplorasi CSF yang cukup;
- d. Identifikasi crosscutting lintas PD guna saling mendukung pencapaian kinerja sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendukung setiap kinerja yang bersifat lintas sektor untuk mencapai kinerja yang bersifat makro maupun isu strategis.

**Tabel 3.1.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATAGORI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan	%	80,25	93,49%	116,50	Sangat Baik	Bidang Dalev
Kinerja Tambahan Pendukung Sasaran Strategis :								
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	2.1. Nilai SAKIP	Nilai	90	90,90	101	Sangat Baik	Sekretariat
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	3.1 Nilai SPIP	Nilai	3,18	3,74	117,61	Sangat Baik	Sekretariat
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Resiko (MR)	4.1 Nilai MR	Nilai	3,03	3,42	112,87	Sangat Baik	Sekretariat
5.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.1. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah $\geq$ 90%	%	100	100	100	Sangat Baik	Sekretariat

2) Uraian Penjelasan Capaian Kinerja (Tabel 3.1.2):

1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran Bappeda untuk tahun 2024 dari target 80,25% terealisasi 93,49% dengan formula penghitungan 60% capaian sasaran pemkab + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah (tabel 3.1.2.1) sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2.1  
Indeks Perencanaan Pemabangunan Daerah  
Tahun 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Sekretariat Daerah	1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif Dan Kolaboratif Melalui Penguatan Akuntabilitas Kinerja				1.1.1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kelembagaan serta Pelaporan Kinerja				1	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100%	96%	96,25%	
		1	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pengadaan	10%	8,06%	80,60%							Persentase OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja				
													Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi				
													Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana				
													Persentase Layanan Keprotokolan yang terpenuhi				
						1	Nilai Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai Pelaporan SAKIP Pemda )	10,95	11,25	102,74%	2	Persentase indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	101%	100,92%		
													Persentase indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan				
													Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi				
													Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah				
													Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi				

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
						2	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75	64	85,24%		Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	100%	115%	114,94%	
												Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah				
												Persentase Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				
												Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan				
												Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan				
		3	Persentase Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	10%		3	Indeks Kualitas Kebijakan	70	-							
		4	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan	10%		4	Indeks Reformasi Hukum	65	77	118,55%						
						5	Nilai SAKIP Setda	90	92	101,67%						
						6	Indeks Kelembagaan	75	75	100,00%						
		1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah			1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat									
		1	Persentase Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat di Sekretariat Daerah	10%		1	Nilai IKM	87,00	94,62	108,76%						

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		Realisasi Tahun 2023		1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	95%	95%	100,00%		
		1	Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Publik	82,70	82,08	99,25%	1	Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD	81,65	81,64	99,99%	2	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	30,50%	35,25%	115,57%	
3	Inspektorat Daerah	1.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan		Realisasi Tahun 2023	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan				1	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	75%	60%	80,00%		
		1	Indeks Reformasi Birokrasi	63,5	70,15	110,47%	1	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,180)	Level 3 (3,161)	99,40%	2	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	85%	70%	82,35%	
						2	Nilai MRI	Level 3 (3,030)	Level 3 (3,020)	99,67%							
						3	Nilai IEPK	Level 2 (2,950)	Level 2 (2,850)	96,61%							
4	Satuan Polisi Pamong Praja		Nilai Stabilitas	85,10	85,24	100,16%	1.1.1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sumenep				1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90%	90%	100,00%	
						1	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS	98,10%	99,25%	101,17%	2	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	90%	90%	100,00%		
						2	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	52,85%	52,95%	99,81%	3	Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan	80%	80%	100,00%		
5	Dinas Pendidikan	1.1	Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Layanan Dasar Pendidikan			1.1.1	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidikan										

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
		1	Indeks Pendidikan	0,59	0,58	98,81%	1	Persentase tenaga pendidik berkompeter				1	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	93,75%	93,75%	100,00%	
							1.1.2	Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik				2	Persentase Lembaga yang berakreditasi A	10,60%	5,34%	50,38%	
							1	APM SD/MI	92,80%	92,80%	100,00%	3	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	98,30%	98,30%	100,00%	
							2	APM SMP/MTs	76,50%	76,50%	100,00%						
							3	APK PAUD	71,94%	71,89%	99,93%						
							1.1.3	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan									
							1	Persentase Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B									
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				1.1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat									
		1	Indeks Kesehatan	0,83	0,83	100,24%	1	Angka Harapan Hidup	72,22	73,86	102,27%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	91,30%	90%	98,58%	
												2	Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	91 Orang	56,30/100.000 KH	162,50%	
			Prevalensi Stunting	14,00	16,70	119,29%	1.1.1	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang				3	Rasio Tenaga Kesehatan	1:690 rasio	1:463 rasio	149,02%	
							1	Total Fertility Rate (TFR)	1,93	2,14	110,88%	4	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	85,00%	85,00%	100,00%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
											5	Persentase Desa Siaga PURI	5,81%	19,50%	335,63%	
											6	Persentase Kampung KB Mandiri	10,00%	2,00%	20,00%	
											7	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	70,69%	59,82%	84,62%	
											8	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	80,00%	79,30%	99,13%	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1	Meningkatnya PPKS Yang Mandiri			1.1.1	Menurunnya Jumlah PMKS									
		1	Persentase PPKS yang mandiri	0,18	0,07	38,89%	1	Persentase PPKS yang telah pulih fungsi sosialnya	17,00%	31,31%	184,18%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhansarana dan prasarana kantor	100%	86%	86,00%
		1.2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.2.1	Meningkatan Perlindungan Anak					2	Persentase PeningkatanPSKS yangDibina	4%	4%	100,00%
		1	Indeks Pembangunan Gender	82,30	82,29	99,99%		Indeks perlindungan anak (IPA)	63,51%	98,00%	154,31%	3	Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi	2%	15,65%	782,50%
						1.2.2	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak					4	Persentase masyarakatyang terlindungi dari resiko kerentanansosial	85%	29%	33,68%
							Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2,54%				5	Persentase PenangananKorban Bencana Alamdan Sosial TerhadapTotal Populasi Korban Bencana Alamdan Sosial	100%	98,93%	98,93%

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
						1.2.3	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah				6	Persentase KetersediaanMakam yangLayak bagi Perintis Kemerdekaan danVeteran	100%	100%	100,00%		
							indeks pemberdayaan gender ( IDG )	63,00%	62,77%	99,63%	7	Persentase KelembagaanDaerah ResponsifGender	1%	0,37%	37,00%		
											8	Persentase Rasio KekerasanPerempuan Termasuk TPPO	3,39%	2%	59,00%		
											9	Persentase Menurunnya Kasus KDRT	0,0052 %	0,0010%	19,23%		
											10	Strata Kabupaten Layak Anak	22,15%	22%	99,32%		
											11	Persentase anak korbankekerasan yangtertangani secara komprehensif	100%	98%	98,00%		
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1	Realisasi Investasi Meningkat			1.1.1	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi										
		1.	Nilai Realisasi Investasi	2.500.000.000	2.745.743.557.715	109,83%	1.	Persentase Realisasi Investasi	3,73	30,64	821,45%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
												2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	100%	100%	100,00%	
												3	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	100%	100,00%	
												4	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	100%	100%	100,00%	
												5	Persentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100,00%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
9	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kelayakan Infrastruktur Perhubungan dan Pemukiman				1.1.1	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar pemukiman yang berkualitas				1	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100,00%	
		1	Indeks Infrastruktur Perhubungan dan Pemukiman	67%	69,2%	103,28%	1	Indeks Infrastruktur Permukiman	0,5	0,54	108,00%	2	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau terdampak relokasi program kabupaten/kota	100%	100%	100,00%	
						1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan				3	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	70%	70%	100,00%		
						2	Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,84	0,844	100,48%	4	Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	15,44%	15%	97,15%		
		1.2	Terkelolanya Lahan Milik Pemda				1.2.1	Terciptanya Sistem Tata Kelola Pertanahan Yang Memadai				5	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100,00%	
			Persentase Lahan Milik Pemda Yang Terkelola	86%	81%	94,19%		Luas Lahan yang Bersertifikat	7	31,12	444,57%	6	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan	92%	85%	92,39%	
												7	Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola	50%	45%	90,00%	
												8	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	60%	60%	100,00%	
												9	b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	30	30	100,00%	
												10	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberanga	65%	60%	92,31%	
												11	b. Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi	80%	75%	93,75%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1	Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-Government				1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola TIK									
		1	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik	85%	85%	100,00%	1	Nilai Indeks SPBE	2,40%	3,73%	155,42%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
												2	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik	85%	99,96%	117,60%	
												3	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	90%	93,99%	104,43%	
												4	Persentase Persediaan Data sektoral Terpadu	100%	70,41%	70,41%	
												5	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	100%	80,13%	80,13%	
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	1.1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Wisata				1.1.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan									
		1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD)	0,30%	0,34%	113,33%	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.500.000	1.700.959	113,40%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	80,00%	92,39%	115,49%	
							1.1.2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal				2	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10%	9,15%	91,46%	
							1	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	65%	66%	101,54%	3	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga	25%	17%	68,00%	
		1.2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan				1.2.1	Meningkatnya Prestasi Bidang Olahraga				4	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Terakreditasi	5%	6%	120,00%	
		1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)					Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	20,00%	41,00%	205,00%						

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
						1.2.2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan									
							Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	1,00%	34,00%	3400,00%						
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata			1.1.1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang				1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
		1.	Indeks Infrastruktur PUTR	75,00%	74,49%	99,32%	1.	Indeks Infrastruktur Dasar	75%	74,13%	98,84%	2	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	53%	51%	96,47%
						1.1.2	Terbangunnya infrastruktur pendukung lingkungan sehat				3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	5,74%	5,74%	100,00%	
						1.	Indeks Infrastruktur Pendukung	75%	74,89%	99,85%	4	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah domestik	71,96%	60,10%	83,52%	
											5	Persentase drainase dalam kondisi baik	93%	93%	100,00%	
											6	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	93%	93%	100,00%	
											7	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	93,42%	65,00%	69,58%	
											8	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	67,04%	70,39%	105,00%	
											9	Persentase tertib jasa konstruksi	63,38%	65,00%	102,56%	
											10	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	28,57%	14,29%	50,02%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.1	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Kontribusi terhadap PDRB			1.1.1	Meningkatnya Pendapatan Koperasi dan UM										
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustri terhadap PDRB	10,90%	18,85%	172,94%	1	Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi	20,00%	16,16%	80,80%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
						2	Persentase Peningkatan Pendapatan UM	16,25%	17,16%	105,60%	2	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa	30%	21%	70,00%		
						1.1.2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Realisasi Th. 2023		3	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa	30%	21%	70,00%		
						1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	5,70%	5,57%	97,72%	4	Persentase Koperasi Sehat	8%	7%	87,50%		
						1.1.3	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian				5	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	31,50%	6%	19,05%		
						1	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	6,44%	6,42%	99,69%	6	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	9,00%	9%	100,00%		
											7	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	6,50%	5,5%	84,62%		
											8	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	5,00%	5,0%	100,00%		
											9	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	15,00%	15,0%	100,00%		
											10	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	95,00%	85,00%	89,47%		
											11	Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	15,00%	17,00%	113,33%		

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
										12	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri	30,00%	24,00%	80,00%		
										13	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100%	100%	100%		
14	Dinas Perikanan	1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perikanan		Realisasi Th. 2023	1.1.1	Meningkatnya Mitigasi Ekosistem Kelautan dan Kepatuhan Pelaku Perikanan									
		1.	Persentase pertumbuhan Ekonomi sub sektor perikanan	4,2%	4,50%	107,14%	1.	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku								
						1.1.2	Meningkatnya Nilai Tambah Pasca Panen									
						1	Persentase Pertumbuhan Produksi Olahan Perikanan									
						1.1.3	Meningkatnya Produksi Perikanan									
						1	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1,30%	3,15%	242,31%						
								15,00%	13,96%	93,07%						
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1	Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik Berkualitas			1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		1	Capaian Penerapan SPBE	100	100	100,00%	1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	92,00	92,12	100,13%					
							2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil	86,00	90,67	105,43%					
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa				1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi								
			Persentase Desa Maju	45	42	92,58%	1	Persentase BUMDESA /BUMDESA BERSAMA yang memberikan kontribusi pada PADes	34,19	23,93	69,99%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	94,28%	94,28%
							1.1.2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas				2	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	13,58%	10,56%	77,76%
							1	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas	69,53	76,17	109,55%	3	Persentase BUMDes maju	7,27%	13,41%	184,46%
							1.1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik				4	Persentase BUMDes bersama yang terbentuk	93,55%	74,19%	79,31%
							1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik	100,00	100,00	100,00%	5	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	50,87%	51,59%	101,42%
											6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	80,76%	119,56%	148,04%	
											7	Persentase Lembaga Adat Yang terfasilitasi	6,59%	12,28%	186,34%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan PDRB Pertanian							1	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%			
		1	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	93	98	105,65%	1	Persentase Ketersedian Pangan	105%	145,74%	138,80%	2	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	100%	100%	100,00%	
		2	PDRB Sub Sektor Pertanian	4,56	4,807	105,42%	1.1.2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian				3	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	100%	100%	100,00%	
							1	Produktivitas Tanaman Pangan (Kedelai)	1,39	1,48	106,47%	4	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	73,51	73,53	100,03%	
							2	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	5,41	5,92	109,43%	5	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	100%	100,00%	
							3	Produktivitas Tanaman Pangan (Cabe Jamu)	4,77	4,77	100,00%	6	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	90%	99,10%	110,11%	
							4	Produktivitas Tanaman Pangan (Kelapa)	1,24	1,27	102,42%						
							5	Produktivitas Tanaman Pangan (Tembakau)	0,67	0,71	105,97%						
							6	Produktivitas Tanaman Pangan (Cabe Besar)	41,63	43,27	103,94%						
							7	Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	3,10	3,17	102,26%						
							8	Produktivitas Tanaman Pangan (Siwalan)	0,17	0,17	100,00%						
							9	Produktivitas Tanaman Pangan (Bawang Merah)	73,20	74,33	101,54%						
							10	Produktivitas Tanaman Pangan (Kacang Hijau)	1,36	1,44	105,88%						
							11	Produktivitas Tanaman Pangan (Jambu Menteng)	0,62	0,65	104,84%						

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
						12	Produktivitas Tanaman Pangan (Cabe Kecil)	43,35	44,46	102,56%						
						13	Produktivitas Tanaman Pangan (Ubi Kayu)	15,16	15,24	100,53%						
						14	Produktivitas Tanaman Pangan (Daging Sapi)	187,60	187,60	100,00%						
18	Dinas Lingkungan Hidup	1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			1.1.1	Meningkatnya Konservasi Lahan									
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,83	63,98	95,74%	1	Indeks kualitas air sungai	53,69	50,00	93,13%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%
						1.1.2	Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Hidup				2	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air	77,1%	77,1%	100,00%	
							Indeks kualitas udara	85,06	90,83	106,78%	3	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	37,50%	37%	98,67%	
							Indeks kualitas lahan	55,66	38,34	68,88%	4	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	20	20	100,00%	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan			1.1.1	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-undangan									
		1	Indeks arsip	7,66	5,36	69,97%	1	Nilai Pengawasan Kearsipan	80	57,36	71,70%	1	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	95,00%	100,00%	105,26%
		1.2	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat			1.2.1	Meningkatnya Kegemaran Membaca				2	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina	95,00	100,00	105,26%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
		1	IPLM	9,5	7,68	80,84%	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	54	78,90	146,11%	3	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	85,00	58,82	69,20%	
												4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik	80,00	71,25	89,06%	
20	Dinas Ketenagakerjaan	1.1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja				1.1.1	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkompetensi									
		1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,01%	78,16%	97,69%	1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	2,00%	1,60%	80,00%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
							1.1.2	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja				2	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2,00%	1,60%	80,00%	
							1	Persentase Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial	100,00%	100,00%	100%	3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11%	66,19%	86,97%	
							1.1.3	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Ditempatkan									
								Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	44,00%	39,18%	89,05%						
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah				1.1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran yang baik									
		1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah	95%	95%	100,00%	1	Persentase Rencana Anggaran Daerah Yang Akuntabel	100%	100%	100%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
						1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan				2	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	93%	93%	100,00%		
						1	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	95%	95%	100%	3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	93%	100,00%		
						1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah										
						1	Persentase Penyelesaian Pelaporan dan Evaluasi Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%							
						1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel										
							Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	92%	92%	100%							
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.1	Meningkatnya Profesionalisme ASN			1.1.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN										
		1.	Indeks Profesionalitas ASN	84	87	103,65%	1.	Indeks Sistem Merit	0,7	0,6	91,43%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
						2.	Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN	83	79	95,08%	2	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	90%	90%	100,00%		

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
						1.1.2	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN				3	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, Fungsional, Formal dan Non Formal	45%	45%	100,00%		
						1	Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN)	33	33	101,09%							
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1	Mewujudkan Nilai-nilai Gotong-royong dalam Kehidupan Masyarakat			1.1.1	Meningkatnya Kondusifitas Konflik										
		1.	Indeks Kesalehan Sosial	71,13	85,91	120,78%	1.	Persentase Penurunan Konflik	5,00%	5,45%	91,74%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	90,85%	90,85%	
											2	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	99,13%	99,13%		
											3	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILKADA/PILEG/PI LPRES	100%	99,80%	99,80%		
											4	Persentase Organisasi Yang Terdaftar dan Teregister	100%	95,54%	95,54%		
											5	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	97,95%	97,95%		
											6	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Yang Terjadi di Wilayah	100%	94,88%	94,88%		

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan			
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
25	Badan Pendapatan Daerah	1.1	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah			1.1.1	Meningkatnya Kontribusi PAD Daerah										
		1.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	5%	1,84%	36,80%	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5%	11,38%	227,60%	1	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100,00%	
						2	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	5%	10,88%	217,60%	2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100,00%		
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Menurunnya Risiko Bencana			1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana										
			Indeks Resiko Bencana Kabupaten	175	137	78,53%	Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,68	90,67%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90	95	105,56%		
											2	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	175	137	78,53%		
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.1	Meningkatkan Keunggulan Riset dan Inovasi Daerah			1.1.1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi										
		1.	Indeks Inovasi Daerah	51,88	42,10	81,15%	1.	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan	75%	80%	106,67%	1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100,00%	
						1.1.2	Meningkatnya Kualitas Data Hasil Riset dan Inovasi				2	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	75%	78,57%	104,76%		
						1	Persentase Data hasil riset dan Inovasi yang berkualitas	75%	75%	100,00%							
						1.1.3	Meningkatnya Kompetensi SDM yang bersertifikasi										
						1	Persentase SDM yang bersertifikasi	35%	27%	77,91%							

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
28	RSUD MOH. ANWAR	1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.1.1	Terjaminnya Akseibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat									
		1	BOR	60-85	80,36%	100,00%	1	BOR	60-85	80,36%	100,00%	1	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor	97%	97%	100,00%
		2	CRR	0,8%	1,06%	100,00%							BOR	60-85	80,36%	100,00%
		3	TOI (Turn Over Internal)	1-3 hari	0,92	100,00%										
28	Kecamatan Kota Sumenep	1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubilk Kecamatan			1.1.1	Meningkatnya Pelayanan Terpadu Kecamatan									
		1	Nilai IKM Kecamatan	88	88	100,00%	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan	100%	100%	100,00%	1	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	100%	100%	100,00%
						1.1.2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa					2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100,00%
						1	Rasio Desa yang terfasilitasi	100%	100%	100,00%	3	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	100%	100%	100,00%	
											4	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	100%	100,00%	
											5	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	100%	100%	100,00%	
											6	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	100%	100,00%	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

NO	OPD	60% Capaian Sasaran Pemkab				20% Capaian Sasaran Perangkat Daerah				20% Capaian Program Perangkat Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Indikator		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Indikator			Target Kinerja	Realisasi Kinerja
											7	Persentase Kerjasama Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	100%	100,00%	
											8	Persentase kelompok masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100%	100,00%	
	<b>FORMULA INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				<b>60%</b>				<b>20%</b>						<b>20%</b>	<b>100%</b>
	<b>NILAI RATA-RATA</b>				<b>92,70%</b>				<b>97,19%</b>						<b>92,17%</b>	
	<b>INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>55,62%</b>				<b>19,44%</b>						<b>18,43%</b>	<b>93,49%</b>

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa semua perangkat daerah mencapai kinerja yang sangat baik. Untuk mencapai kinerja yang sangat baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan desk dan pencermatan capaian kinerja setiap triwulan. Dalam mengawal capaian kinerja, ditemui permasalahan sebagai berikut:

#### 1. SEKRETARIAT DAERAH

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah. Pada tahun 2024 target Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah 90 dengan predikat A dan terealisasi dengan nilai 91,50 berpredikat AA atau dengan kinerja pencapain 101,67 persen. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah masuk dalam tiga besar nilai tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/266/KEP/435.013/2024 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Reward atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2024.

Beberapa rekomendasi dari LHE SAKIP Tahun 2024 diantaranya pada komponeen Perencanaan Kinerja untuk menyusun Perjanjian Kinerja pada Level Eselon 3 ke bawah dengan memanfaatkan pohon kinerja yang sudah disusun. Pada Laporan Kinerja direkomendasikan agar Laporan Pengukuran Kinerja secara berjenjang Triwulanan yang akan datang agar dilakukan secara berjenjang untuk semua level pegawai yang disertai dengan sumber/bukti data pendukung atas capaian kinerja yang dilaporkan.

Sedangkan pada Pelaporan Kinerja direkomendasikan untuk melakukan upaya konkret dan jelas seperti pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan tingkat efisiensi atas 2 IKU (persentase PD yang difasilitasi pelaksanaan SAKIP dan RB serta persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi) yang kurang efisien dan 4 IKU (Indeks Kelembagaan, Nilai EKPPD, Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Indeks Tata Kelola

Pengadaan Barang dan Jasa) yang sangat kurang efisien. Sedangkan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal direkomendasikan untuk memaksimalkan Pemanfaatan hasil Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya untuk peningkatan capaian kinerja.

Semua rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep sudah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi internal dengan semua bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Indeks Kelembagaan. Mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Sampai saat ini, belum ada rilis nilai indeks yang secara resmi dievaluasi/diumumkan oleh Kemenpan dan RB. Untuk penilaian mandiri sebagaimana mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal tahun 2023. Hasil rata-rata penilaian mandiri evaluasi kelembagaan dari 24 perangkat daerah dengan skor 75,28 pada peringkat komposit P-4. Nilai yang didapatkan oleh perangkat daerah tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif.

## 2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dengan mengacu pada table Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada capaian sasaran nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD dapat diketahui capaian nilai yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,37. Secara spesifik nilai IKM tahun 2023 sebesar 81,27 dan capaian nilai IKM tahun 2024 sebesar 81,64. Faktor yang mendukung kenaikan capaian sasaran nilai IKM layanan Sekretariat DPRD adalah

adanya kenaikan nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi peningkatan pelayanan pada fasilitasi layanan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat Paripurna DPRD.

Salah satu indikator kinerja Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah Indikator Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator Nilai IKM ini merupakan penerapan dari sasaran RPJMD yakni meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah. Implementasi pengukuran survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh unit-unit layanan publik yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pengukuran indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep menindaklanjuti dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan tiga responden utama yakni Pimpinan dan Anggota DPRD, Elemen Masyarakat dan Aparatur Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD. Pengukuran IKM terhadap tiga responden tersebut dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

### 3. *INSPEKTORAT DAERAH*

- a. Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
  - Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan masih dipersepsikan oleh OPD bukan merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.
  - Seringkali TLHP dari OPD tidak sesuai/tidak sama dengan yang dimaksud oleh BPK sehingga hal tersebut memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.
  - Pelaksanaan Desk Penyelesaian Tindak Lanjut akan dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali

- sebagai monitoring atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- b. Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Penyelesaian tindak lanjut hasil terhadap temuan APIP masih dipersepsikan oleh OPD bukan merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.
  - Usaha yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan APIP yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Daerah Pembantu sesuai wilayah kerjanya.
- c. Berkaitan indikator kinerja Kapabilitas APIP Level 3 terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep telah berhasil mencapai kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP tanggal 4 Oktober 2024 nomor: PE.09.03/LHP-759/PW13/6/2024 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
  - Usaha yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk mempertahankan kapabilitas APIP Level 3 diantaranya dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta perbaikan layanan untuk Assurance dan Consulting.

#### 4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sumenep (IKU Bupati) Tahun 2024 tentang Nilai Stabilitas tercapai 85,24.

Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85,10. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya capaian tersebut adalah dukungan dari SDM yang bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan gangguan kamtibmas dan pelanggaran perda atau perkara serta penyelesaian terhadap kejadian kebakaran. Anggaran yang dimiliki mendukung tercapai realisasi. Pemaksimalan sarana dan prasarana bagian terpenting juga agar tercapainya realisasi.

Untuk Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas dengan target 98,10% terealisasi sebesar 99,25% Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendukung adalah penyelesaian terhadap gangguan aduan gangguan kamtibmas, siaga di pos pantau dalam rangka cegah dini dan memberikan penyuluhan terhadap PKL-PKL, serta penyelesaian aduan pelanggaran perda atau perkara.

Untuk Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas dengan target 52,85% terealisasi 53,75% dengan penjelasan bahwa angka gangguan kamtibmas tahun sekarang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa gangguan kamtibmas yang terjadi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun lalu dengan didukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan didukung pula oleh sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

#### 5. *DINAS PENDIDIKAN*

- a. Indeks Pendidikan adalah Nilai dengan rentang 0-1 adalah semakin angka mendekati 1 kualitas lingkungan belajar untuk pendidikan dasar dalam hal proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dasar telah memenuhi semua

indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan tersebut berkualitas.

- b. PAUD adalah pada tahun 2024 APK paud masih mencapai 71,89 % dari target yang telah di rencanakan di setiap tahunnya walaupun masih di bawah target dari tahun ke tahun tetap semakin naik.
  - c. SD/MI adalah Nilai APM yang tinggi menunjukkan daya serap SD semakin tinggi.
  - d. SMP/MTs adalah Nilai APM yang tinggi menunjukkan daya serap SMP semakin tinggi.
6. *DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*
- a. Indeks Kesehatan meningkat menggambarkan juga efektivitas pelaksanaan program pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan.
  - b. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku. Angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar 73,86 tahun, angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 72,22 tahun. Angka Harapan Hidup Tahun 2024 naik dibandingkan AHH Tahun 2023 sebesar 72,47 tahun.
  - c. Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Angka TFR di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah sebesar 2,12. Sedangkan menurut hasil pendataan keluarga yang dilakukan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024, diperoleh angka TFR sebesar 2,14 dari target yang ditetapkan sebesar 1,93. Hal ini berarti bahwa wanita usia subur (usia 15 - 49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 orang anak selama masa usia suburnya.

7. *DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran keberhasilan Pembangunan yang mempertimbangkan kesenjangan gender. IPG digunakan untuk mengevaluasi perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di atrgetkan sebesar 82,27 % sedangkan realisasi di tahun 2024 masih belum bisa di sampaikan dikarenakan perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dilakukan oleh BPS.
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tahun 2024 target yang ditentukan sebesar 59,82% sedangkan realisasi di tahun 2024 masih belum bisa di sampaikan dikarenakan perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilakukan oleh BPS.
- c. Indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal ditargetkan sebesar 1% dan terealisasi sebesar 31,30%. Adapun perhitungan didapatkan dari jumlah PPKS penerima manfaat dibagi dengan Jumlah PPKS yang seharusnya dibantu dikali 100%. Untuk tahun 2024 jumlah PPKS penerima manfaat sebanyak 207.215 dan Jumlah PPKS yang seharusnya dibantu sebanyak 661.818 orang sebagaimana daftar jumlah PPKS pada lampiran laporan ini.
- d. Indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2024 di targetkan sebesar 65% dan terealisasi sebesar 50,21%. Adapun perhitungannya didapat dari data PSKS yang ada pada tahun 2024 sebagai berikut :
  - Potensi sosial Masyarakat (PSM) 30 orang

- Karang taruna tiap desa ada 334, yang terakreditasi dan aktif 25 lembaga
  - Pekerja sosial ada 2 orang
  - TKSK ada 27 orang
  - LKSA ada 23 lembaga
  - LKSLU ada 8 lembaga
  - LK3 ada 1
  - masjid yang dibantu 2024 sebanyak 94 masjid terealisasi 87 masjid. Yang tidak terealisasi 7 karena Dikarenakan kurangnya kelengkapan administrasi (proposal tak ada )
  - Musholla di bantu 2024 sebanyak 131 musholla, yang terealisasi 116. Yang tidak terealisasi sebanyak 15 dikarenakan kurangnya kelengkapan administrasi (proposal tak ada )
  - ponpes dan Yayasan dibantu 2024 sebanyak 37 ponpes dan Yayasan, sedangkan yang terealisasi sebanyak 32 lembaga dan 4 lembaga tidak terealisasi dikarenakan kurangnya kelengkapan administrasi (proposal tak ada)
  - organisasi Masyarakat dibantu ada 4, realisasi 4.
  - sound system 1 lembaga, realisasi 1 lembaga.
- e. Indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berakreditasi terhadap total jumlah PSKS tahun 2024 di targetkan sebesar 52% dan terealisasi sebesar 12,23%. Adapun perhitungannya didapat dari Jumlah PSKS sebanyak 425 terdiri dari :
- Potensi sosial Masyarakat (PSM) 30 orang
  - Karang taruna tiap desa ada 334, yang terakreditasi dan aktif 25 lembaga
  - Pekerja sosial ada 2 orang
  - TKSK ada 27 orang, yang terakreditasi 27 orang
  - LKSA ada 23 lembaga
  - LKSLU ada 8 lembaga

- LK3 ada 1

Sedangkan Untuk PSKS yang terakreditasi sebanyak 52 sehingga Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berakreditasi untuk tahun 2024 sebesar 12,23%.

8. *DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN*

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep yang tersaji pada (tabel 3.1.2.1) dapat dilihat bahwa semua target indikator kinerja tujuan dan sasaran sudah teralisasi dan capaian indikatornya berkategori sangat tinggi.

- Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman dengan target 0,67 Indeks realisasi kinerja 0,69 Indeks dengan capaian sebesar 103%, hal ini menunjukkan Kualitas dan Kelayakan Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman sudah membaik.
- Tujuan 2 Terkelolanya Lahan Milik Pemda memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Lahan Milik Pemda yang Terkelola dengan target 86% Indeks realisasi kinerja 81% Indeks dengan capaian sebesar 94%, hal ini menunjukkan Lahan Milik Pemda masih ada yang belum dikelola.
- Sasaran 1 Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Permukiman dengan target 0,5 Indeks realisasi kinerja 0,54 Indeks dengan capaian sebesar 108%, hal ini menunjukkan sarana dan prasarana dasar permukiman mengalami peningkatan.
- Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan target 0,84 Indeks realisasi kinerja 0,844 Indeks dengan capaian sebesar 10%, hal ini

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan sudah membaik.

- Sasaran 3 Terciptanya Sistem Tata Kelola Pertanahan yang Memadai memiliki indikator kinerja yaitu Luas Lahan yang Bersertifikat dimana realisasi kinerja 31,12 Ha dari target 7 Ha atau capaian sebesar 444,57%, hal ini dikarenakan banyaknya perangkat daerah yang mengajukan persertifikatan tanahnya.

#### 9. *DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA*

Ada beberapa capaian realisasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- Realisasi pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi publik yang belum terpenuhi targetnya dikarenakan kurangnya jumlah koneksi jaringan ke OPD yang disebabkan oleh adanya pengurangan OPD di tahun 2023.
- Realisasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/kota yang belum terpenuhi targetnya dikarenakan belum terpenuhinya data statistik sektoral dari OPD terkait.
- Realisasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum terpenuhi targetnya dikarenakan belum terpenuhinya data evaluasi IKAMI dari OPD terkait dan kurangnya Alat Penunjang Utama Persandian (APU).

#### 10. *DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA*

Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD diformulasikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari Retribusi Daerah dengan jumlah total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep dalam satu tahun. Pada tahun 2024 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD yaitu mencapai 0,34% dari target 0,30% dengan perbandingan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2024 sebesar Rp 1.034.489.413,- dan jumlah total PAD Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebesar Rp 303.163.796.064,-

### 11. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Untuk capaian Indikator Utama Daerah kabupaten sumenep (IKU Bupati) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep hanya mengampu 1 (satu) indikator Yaitu Indeks Infrastruktur. Dimana pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 75%. Realisasi Indeks Infrastruktur (IKU Bupati) Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah sebesar 74,49% dari target yang direncanakan pada tahun tersebut sebesar 75%, atau Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 adalah 99,32%. Tergolong kategori Sangat Tinggi. Capaian realisasi ini meningkat sebesar 1,26% dari realisasi 2023 yang sebesar 73,23%.

Faktor yang mendukung realisasi dari 2 sasaran tujuan OPD PUTR yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu realisasi dari sasaran berikut:

- Indeks Infrastruktur Dasar pada tahun 2024 dengan target 75,00% terealisasi 74,13%
- Indeks Infrastruktur Pendukung pada Tahun 2024 terealisasi 74,89%

### 12. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Untuk Sasaran Meningkatnya Pendapatan UM dari target kinerja sebesar 16.25% dan realisasinya sebesar 17,16 dengan Capaian kinerja 105.60% telah memenuhi capaian target kinerja dengan kategori sangat tinggi karena adanya pengaruh pada tingkat inflasi yang relative stabil, kenaikan penghasilan yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada pendapatan usaha mikro. Dukungan Pemerintah melalui program-program pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan kemudahan perizinan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha mikro;
- Untuk Sasaran Meningkatnya Pendapatan Koperasi dari target kinerja sebesar 20% dan realisasinya sebesar 16,16 dengan Capaian kinerja 80.80% telah memenuhi capaian target kinerja

dengan kategori tinggi karena Peningkatan pendapatan koperasi umumnya dipengaruhi oleh pengelolaan yang efisien, inovasi layanan dan usaha, serta adaptasi terhadap perubahan pola pemasaran. Sedangkan faktor yang menghambat peningkatan pendapatan koperasi lebih kepada berkurangnya jumlah keanggotaan koperasi dan persaingan usaha USP dengan pinjaman online;

- Untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan masih Menunggu Rilis Resmi BPS Th. 2025;
- Untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian masih Menunggu Rilis Resmi BPS Th. 2025.

### 13. DINAS PERIKANAN

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan menggunakan angka sangat sementara diakrenakan data yang dibutuhkan untuk menghitung capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan sampai saat dokumen ini disusun data dimaksud belum dipublikasikan oleh BPS. Untuk sementara diprediksikan capaian kinerja dalam IKU Dinas Perikanan Tahun 2024 pada indikator tujuan persentase pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan mencapai 131,2% dari target dengan realisasi kinerja mencapai 4,6 % dari target kinerja sebesar 3,5%. Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran persentase pertumbuhan nilai tambah sb sektor perikanan mencapai 166,7% dengan realisasi kinerja sebesar 7% dari target sebesar 4,2%.

### 14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sasaran Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah Meningkatnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan target 92% terealisasi 92,26 atau capaian atas target sebesar 100,28%, sehingga

dikategorikan “sangat tinggi”. Sasaran ini diampu oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk diampu oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase kepemilikan KTP Elektronik (perekaman KTP Elektronik), dengan formulasi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah merekam dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100% dan diperoleh 96,4% untuk tahun 2024.
- Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dengan formulasi jumlah anak usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah keseluruhan anak usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari dan belum menikah dikalikan 100%. Pada tahun 2024 diperoleh persentase kepemilikan KIA sebesar 57,98%.
- Persentase kepemilikan KK (Kartu Keluarga), dengan formulasi jumlah keluarga yang memiliki KK dibagi jumlah keseluruhan keluarga yang terdaftar di database Disdukcapil Kab. Sumenep.

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil diampu oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase kepemilikan akte kelahiran, dengan formulasi jumlah anak usia 0 tahun sampai 17 tahun yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah keseluruhan anak usia 0 tahun sampai 17 tahun dikalikan 100%. Pada tahun 2024 persentase kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Sumenep diperoleh sebesar 99,18%.
- Persentase kepemilikan akte kematian, dengan formulasi jumlah akte kematian yang dimiliki dibagi jumlah keseluruhan peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100%. Seluruh

peristiwa kematian yang dilaporkan di tahun 2024, sudah diterbitkan akte kematiannya.

- Persentase kepemilikan akte perkawinan/perceraian, dengan formulasi jumlah akte perkawinan/perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah keseluruhan peristiwa perkawinan/perceraian yang dilaporkan. Persentase kepemilikan akte perkawinan/perceraian tercapai 100%.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berfungsi dalam pemenuhan dukungan teknis berfungsinya jaringan komunikasi data di seluruh titik layanan administrasi kependudukan, berfungsinya perangkat komputer beserta aplikasi database SIAK dan petugas operator serta administrator database kependudukan yang berkompeten. Sedangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan diampu oleh Sekretariat.

#### *15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA*

##### a. Tujuan Strategis:

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator Prosentase Desa Maju.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup 330 Desa berdasar data Potensi Desa Tahun 2023. Penghitungan Indeks Desa Membangun di Sumenep diperoleh dari indeks rata rata adalah 0,7592, Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa di Sumenep dalam status Desa Maju bila dibandingkan dengan batas ambang batas status Maju ( $>0,7072$ ). Hal ini juga berarti mayoritas Desa di Sumenep di dominasi oleh Desa Maju (Desa Pra Swasembada).

Pada tahun 2024, status kemajuan dan kemandirian Desa untuk Desa Berkembang (Desa Madya) sebesar 27,88% atau 92 desa. Sedangkan jumlah Desa memiliki status Desa Maju (Desa Pra-Sembada) sebesar 41,52% atau 137 Desa, sementara Desa Mandiri (Desa Sembada) sebesar 30,61 % atau 101 Desa

dan Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) berjumlah 0 Desa (0%) dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) berjumlah 0 Desa (0%). Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun tersebut memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan indikator tujuan tersebut diatas maka pada tahun 2024 untuk desa maju turun sebanyak 10 Desa atau sebesar (3,03%). Menurunnya desa maju pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 Desa Mandiri meningkat sebanyak 62 Desa atau meningkat sebesar 18,79%.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, tujuan strategis meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator prosentase desa maju pada tahun 2024 memiliki target sebesar 44,85% atau 148 Desa dengan realiasi sebesar 41,52% atau 137 Desa sehingga rata-rata capaian indikator kinerjanya sebesar 92,58% atau termasuk kategori sangat tinggi.

b. Sasaran Strategis:

- Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif dengan indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes. Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (lokal genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat, upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih memiliki keterbatasan pengelolaaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusia masih memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah

diperlukan stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, potensi dan lingkungan hidup desa guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

Salah satu aspek utama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan ekonomi adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

Hal ini dapat diketahui dari data yang ada bahwa pada tahun 2024 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 328 Bumdes, 90 BUMDes kategori Sehat, 137 BUMDes kategori Aktif, 101 BUMDes kategori Tidak Aktif.

Berdasarkan Pasal 117 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa BUMDes harus dijadikan badan hukum, pada tahun 2024 BUMDes yang melakukan pendaftaran Sertifikat Hukum sebanyak 305 BUMDes sedangkan yang belum mendaftar sebanyak 23 BUMDes, dari 305 BUMDes yang mendaftar sudah terbit Badan Hukum sebanyak 67 BUMDes, Perbaikan Badan Hukum sebanyak 32 BUMDes, Perbaikan Nama BUMDes sebanyak 11 BUMDes dan Nama yang sudah terverifikasi sebanyak 193 BUMDes.

Untuk BUMDESMA yang terbentuk pada Tahun 2024 sebanyak 23 BUMDESMA (258 Desa), 20 BUMDESMA (251 Desa) merupakan Hasil Perubahan/Transformasi Pengelolaan UPK Eks. PNPM menjadi BUMDesma sedangkan 3 BUMDESMA (7 Desa) terbentuk berdasarkan Kawasan (BUMDESMA Kawasan)

Sejalan dengan indikator sasaran Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes, maka pada tahun 2024 Jumlah BUMDes yang memberikan

kontribusi pada PADes sebanyak 84 BUMDes sedangkan BUMDesMa pada tahun 2024 masih belum memberikan kontribusi pada PADes. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 BUMDes yang memberikan kontribusi PADes sebanyak 34,19% atau 120 BUMDes/BUMDesMa dengan realisasi sebesar 23,93% (84 BUMDes/BUMDesMa) maka capaian yang diperoleh sebesar 70% atau termasuk kategori sedang.

Berikut disajikan Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Ma) Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan Indikator Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.

Proses pengukuran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen secara tepat waktu, antara lain: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Input Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementerian dalam Negeri dan Input Data Indeks Desa membangun (IDM).

Pada tahun 2024 target capaian Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik sebesar 100% (330 Desa) dengan realisasi sebesar 100% (330 Desa) sehingga capaian yang dihasilkan adalah sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari pengumpulan dokumen dan data secara tepat waktu, yang terdiri dari: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Input Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementerian dalam Negeri serta Input

Data Indeks Desa Membangun (IDM) pada Aplikasi IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa dengan indikator Prosentase Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas.

Proses pengukuran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa dengan cara melakukan identifikasi dan pendataan lembaga dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep memastikan setiap lembaga memiliki informasi dasar seperti nama, struktur organisasi, jumlah anggota, dan program kerja.

Adapun pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah melakukan identifikasi dan pendataan lembaga masyarakat desa. Berdasarkan data dasar Tahun 2024 bahwa di Kabupaten Sumenep terdapat Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 10.441 LKM D/K yang terdiri dari Karang Taruna 331 Lembaga, Posyandu 1367 Lembaga, Lembaga pemberdayaan Masyarakat 331 Lembaga, TP-PKK 362 Lembaga, RW. 2017 dan RT 6037. Dari 10.441 LKM D/K yang ada, aktif 7260 lembaga yang terdiri dari TP-PKK 362 lembaga, Posyandu 1.363 Lembaga, Karang Taruna 165 Lembaga, RW 1.345 Lembaga dan RT 4.025 Lembaga.

Sejalan dengan indikator prosentase Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 69,53% atau sebanyak 7260 Lembaga yang berkualitas. Berdasarkan realisasi pada tahun 2024 Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebanyak 8.714 lembaga atau 83,46% yang terdiri dari TP-PKK 360 lembaga, Posyandu 1.363 Lembaga, Karang Taruna 130 Lembaga,

Rukun Warga 1.710 Lembaga dan Rukun Tetangga 5.151 Lembaga sehingga capaian kinerjanya sebesar 120,03% atau termasuk kategori sangat tinggi.

#### 16. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Berikut kami sajikan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep yang mendukung indikator kinerja Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagai tolok ukur kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas pada tahun berjalan sebagai berikut:

- Semakin tinggi Skor Pola Pangan harapan (PPH), pola konsumsi pangan masyarakat semakin berkualitas.
- Tingginya persentase ketersediaan pangan, menunjukkan semakin banyaknya jumlah bahan pangan pokok yang tersedia untuk dikonsumsi Masyarakat.

#### 17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Berdasarkan PermenLHK No 27 Tahun 2023 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), maka formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota menjadi  $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ .

Kategori IKLH yaitu : rentang skor  $90 \leq x \leq 100$  kriteria sangat baik, rentang skor  $70 \leq x < 90$  kriteria baik, rentang skor  $50 \leq x < 70$  kriteria sedang, rentang skor  $25 \leq x < 50$  kriteria kurang dan rentang skor  $0 \leq x < 25$  kriteria sangat kurang. Nilai IKLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tergolong SEDANG yaitu 63,98.

Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur menggunakan 8 parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO<sub>3</sub>-N, Total Phosphat, Fecal Coliform. Parameter Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Realisasi nilai IKA sebesar 50,00, nilai IKU 90,83 dan nilai IKL sebesar 38,34. Nilai IKA dipengaruhi adanya anomali cuaca dimana musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan, sehingga debit air sungai turun oleh berbagai variabel antara lain upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, fluktuasi debit air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, pertanian dan domestik. Nilai IKA turun dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kelas sungai yang dipantau termasuk kelas III sedangkan hasil pemantauan dihitung dengan membandingkan dengan baku mutu kualitas air sungai kelas II, sehingga ada pelampauan baku mutu parameter DO, BOD, COD dan Fecal Coli dari pemantauan kualitas air sungai yang berpengaruh terhadap penurunan capaian IKA.

Nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keadaan iklim, arah angin, topografi dan sumber pencemar udara, yang terdiri dari sumber alami/biogenic (letusan gunung berapi, dekomposisi biotik) dan antropogenik. Sumber pencemar antropogenik adalah pencemaran akibat aktivitas manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Nilai IKU naik dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya peningkatan pemeliharaan lahan dan pengendalian kualitas udara diperkotaan, berpengaruh terhadap peningkatan capaian IKU.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKL, antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan

rehabilitasi hutan/lahan. Nilai IKL turun dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya perubahan pengukuran lokasi dengan menggunakan citra satelit berpengaruh terhadap penurunan capaian IKL. Penurunan disebabkan karena adanya penurunan luas hutan yang terjadi karena terdapat perubahan status lahan hutan menjadi non lahan hutan yang dilakukan oleh KLHK. Penambahan luas dan Perubahan status lahan hutan merupakan kewenangan KLHK, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambah luas lahan hutan tersebut.

Penginputan, perhitungan dan penyajian data IKLH Tahun 2024 sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dengan menggunakan aplikasi IKLH yang disediakan, difasilitasi dan dipantau serta diverifikasi secara langsung (realtime) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari hasil pelaporan data pada aplikasi tersebut, maka KLHK merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Untuk hasil Indeks Kualitas Air (IKA) :

- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik.
- Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

- b. Untuk hasil Indeks Kualitas Udara (IKU):
- Agar menambah jumlah SDM pengendalian pencemaran udara serta melakukan pelatihan.
  - Menyiapkan anggaran APBD khusus untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara.
  - Melakukan pemantauan kualitas udara dengan penggunaan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar.
  - Meningkatkan peranserta masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara.
  - Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara.
  - Diharapkan untuk tahun depan dapat melakukan pengisian data pada aplikasi Indeks Respon dengan lengkap.
- c. Untuk hasil Indeks Kualitas Lahan (IKL):
- Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan.
  - Melakukan pengayaan dan pemeliharaan tutupan hutan pada APL.
  - Merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman yang telah ada pada area berfungsi lindung (sempadan sungai dengan kemiringan > 25 %) untuk mempertahankan serta meningkatkan luas belukar pada fungsi lindung.
  - Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya yang telah ada.
  - Perlu penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.
  - Perlu peningkatan peranserta pemangku kepentingan.

#### *18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*

Pada indikator Nilai Pengawasan kearsipan mengalami penurunan disebabkan antara lain :

- Masih Kurangnya SDM kearsipan secara kualitas keilmuan.

- Kurangnya dukungan dari pencipta arsip (Perangkat Daerah dan Kecamatan) dalam pengelolaan arsip yang diciptakan.

#### 19. DINAS KETENAGAKERJAAN

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2024 dilihat dari target belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan yang tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2024 dilihat dari target belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dan tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah.

#### 20. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK, pemeriksaan keuangan oleh BPK dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yg disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Sumenep Telah Mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun Anggaran 2017 dan bisa mempertahankan opini tersebut hingga Tahun 2023.

Hal ini ditunjang dengan Telah Sesuai LKPD Kabupaten Sumenep sesuai dengan SAP dan Regulasi yang berlaku. Opini Laporan Keuangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran belum Bisa disajikan. Hal ini dikarena masih dalam proses pemeriksaan.

#### 21. *BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Nilai Indeks Profesionalisme ASN dengan Kategori “Tinggi” menunjukkan tingkat profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat Baik.
- Nilai Indeks Penilaian Sistem Merit dengan Kategori “Baik” menunjukkan Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Sumenep sudah Baik.

## 22. *BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

Urusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai peran dalam mendukung peningkatan harmoni sosial dan wawasan kebangsaan serta peningkatan kesadaran politik masyarakat. Guna meningkatkan harmoni sosial dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Sumenep diarahkan melalui Monitoring wilayah dan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencapai kondisi wilayah yang aman, damai serta menjunjung tinggi budaya lokal. Sedangkan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung oleh Ormas dan Orpol demi mewujudkan masyarakat yang sadar politik. Dalam mencapai nilai indeks kesalehan sosial mencakup aspek-aspek stabilitas sosial, solidaritas sosial, dan gotong royong sudah baik.

Berikut kami sajikan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang mendukung indikator kinerja Bupati Sumenep tahun 2024 sebagai tolok ukur kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol pada tahun berjalan adalah:

- Persentase Penurunan Konflik Sosial Dalam Mencapai Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat sudah BAIK.
- Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu Jumlah partisipasi masyarakat dalam PILPRES dan PILKADA sangat baik.

## 23. *BADAN PENDAPATAN DAERAH*

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang

dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari berbagai komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2024, target persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 5 persen, terealisasi sebesar 1,8 persen. Sedangkan hasil capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah menunjukkan capaian sebesar 11,89 persen.

Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektifitas pendapatan harus dinaikkan. Kemudian peningkatan pendapatan diikuti juga dengan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, agar pendapatan melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

#### 24. *BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

Nilai Indeks Kapasitas Daerah dengan target capaian sebesar 0,75 hanya bisa tercapai sebesar 0,68 atau 90,66%. Hal ini disebabkan pada saat penilaian IKD, terdapat dokumen kebencanaan yang masih belum disahkan oleh Kepala Daerah. Dokumen kebencanaan ini merupakan salah satu komponen pendukung dalam penilaian IKD Kabupaten. Dokumen kebencanaan tersebut di antaranya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon). Ada 3 (tiga) Dokumen Rencana Kontijensi

yang disusun pada tahun 2024, yaitu Renkon Cuaca Ekstrem, Renkon Banjir dan Renkon Longsor.

#### 25. *BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH*

Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja ditargetkan hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan sebesar 75% teralisasi sebesar 78,57% capaian kinerjanya yang dihasilkan pada tahun 2024 sebesar 100% (sangat baik). Ini didukung program penelitian dan pengembangan daerah sebanyak 11 kajian diantaranya:

- Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sustainable Tourism Di Kabupaten Sumenep.
- Perancangan Teknologi Tepat Guna Sw-Cage Dan Sw Dryer Menggunakan Metode Pahl Beitz Dalam Meningkatkan Daya Saing Rumput Laut Di Kabupaten Sumenep.
- Sistem Informasi Manajemen Dalam Pendataan Garis Kemiskinan Untuk Transparansi Dan Bantuan Tepat Sasaran Di Kabupaten Sumenep.
- Strategi Pengembangan Pemasaran Pertanian Di Kabupaten Sumenep.
- Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) Tahun 2025-2029.
- Indeks Kesalehan Sosial Dan Indeks Toleransi Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
- Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Program Dan Layanan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep Menggunakan Online Single System.
- Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Target Pasar Pariwisata Pantai Gili Iyang Kabupaten Sumenep.
- Akselerasi Inovasi Teknologi Budidaya Melon Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Sumenep.

- Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Minat Masyarakat Terhadap Pemilihan Moda Transportasi Udara Di Kabupaten Sumenep.
- Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029.

Sedangkan jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang belum ditindaklanjuti dan masih berproses dalam jangka panjang pada tahun 2024 sebanyak 3 kajian diantaranya :

- Pengembangan Wisata Edukasi Kreatif Berbasis Kerajinan Serat Nanas Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep .
- Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Berbasis Olahan Ikan Laut Terhadap Tinggi Badan Dan Berat Badan Balita Stunting Di Kabupaten Sumenep.
- Hubungan Saluran Komunikasi Dan Persepsi Inovasi Teknologi Tambak Garam Pada Keputusan Adopsi Petambak Garam Rakyat Di Kabupaten Sumenep.

#### *26. RSUD MOH. ANWAR*

Berdasarkan data capaian indikator pada table 2.2 di atas menunjukkan bahwa Semua Indikator telah memenuhi Standar, Untuk TOI (Turn Over Interval) dari standar 1 – 3 hari realisasinya mencapai 0,92 Hari artinya pada tahun 2024 jumlah Pasien meningkat, sehingga periode tempat tidur tidak dipakai tidak sampai 1 (satu) hari sudah diisi/ditempati kembali. Dan ALOS dari Standar 6-9 hari, realisasinya mencapai 3,77 hari artinya bahwa Rata- rata pasien yang dirawat di RSUD tidak sampai 6 hari Alhamdulillah sudah Sehat dan boleh pulang.

#### *27. KECAMATAN KOTA SUMENEP*

Pada tabel diatas capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 merupakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan skor 88 sedangkan untuk target capaian indikator ini adalah 88. Hal ini menunjukkan Survey Kepuasan Masyarakat sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

**1.2. Nilai SAKIP**

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 90.00 dengan katagori A (Memuaskan).

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor(nilai)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00%	27,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00%	27,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00%	13,50%
4.	Evaluasi Kinerja	25,00%	22,50%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>90,00%</b>

**3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Perbandingan**

Perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2022–2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda apabila disandingkan dengan tahun, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.3  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASA	% CAPAIAN	TARGET	REALISASA	% CAPAIAN
1.	Maningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan	%	-	-	-	80,25	93,49	116,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.2. Nilai SAKIP	Nilai	85,00	89,56	105,36	90	90,90	101
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah ≥ 90%	%	100	100	100	100	100	100

*Uraian Penjelasan Perbandingan Capaian Kinerja :*

1. Sasaran Strategis Maningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan pada

tahun 2023 perubahan atas petunjuk Kemenpan Reformasi dan Birokrasi RI dengan ini yang dihasilkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 116,50% ditargetkan tahun 2024 sebesar 80,25% terialisasi sebesar 93,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja (Sangat Baik).

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator kinerja Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 85,00% terialisasi sebesar 89,56%, maka rialisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 105,36%. Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan 90% terialisasi sebesar 90,90 capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 101%.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  $\geq 90\%$  ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100% terialisasi sebesar 100%, maka rialisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan 100% terialisasi sebesar 100% capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 100%.

**3.1.3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.4  
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RIALISASI KINERJA TH. 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan	%	93,49	80,75	115,78
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.2. Nilai SAKIP	Nilai	90,90	90,00	101
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah $\geq 90\%$	%	100	100	100

*Uraian Penjelasan Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis :*

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Perencanaan Pembangunan yang tercapai tahun 2024 terialisasi sebesar 86,37% dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 80,75% tingkat kemajuan sebesar 86,37% dari 55,62% Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, 19,44% Capaian Sasaran Perangkat Daerah, 18,43% Capaian Program Perangkat Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP tahun 2024 terialisasi sebesar 90,90 dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 90,00 tingkat kemajuan sebesar 99,01%.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  $\geq 90\%$  tahun 2024 terialisasi sebesar 100% dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 100% tingkat kemajuan sebesar 100%.

**3.1.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran dengan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran Bappeda dengan target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.5  
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan	%	93,49	95,33	98,07
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.2. Nilai SAKIP	Nilai	A	A	100
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah $\geq 90\%$	%	100	-	-

*Uraian Penjelasan Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain:*

Berdasarkan tabel 3.1.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran BAPPEDA Kabupaten Sumenep disandingkan dengan BAPPEDA Kota Yogyakarta.

**3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran, pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.6  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
<b>I</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	%	<b>80,25</b>	<b>93,49</b>	<b>116,5</b>	<b>Berhasil</b>	-
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	Nilai	<b>27,95</b>	<b>27</b>	<b>96,60</b>	<b>Berhasil</b>	-
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Nilai	27,05	27	99,82	Berhasil	-
		Nilai Komponen Pelaporan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Laporan	14	14	100	Berhasil	-
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program > 90%	%	100	100	100	Berhasil	-
		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Diproses Sesuai Ketentuan Tuntas Dan Tepat Waktu	%	100	100	100	Berhasil	-
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Dikoordinasikan Dan Ditindaklanjuti Tuntas	%	100	100	100	Berhasil	-
		Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya	%	100	100	100	Berhasil	-
		Nilai SKM Internal	Nilai	87	87,78	100,90	Berhasil	-
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Lengkap Dan Tepat Waktu	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.5	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.1.6	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Kinerja Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Informasi Disajikan Lengkap Dan Tepat Waktu	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
1.1.7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Berkala	Dokumen	4	4	100	Berhasil	-
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengajuan pemberian gaji/tunjangan disusun sesuai ketentuan dan tersampaikan tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil	-
		Persentase pemberian gaji/tunjangan disalurkan tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil	-
1.2.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen pengelolaan keuangan harus disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil	-
1.2.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan ditindaklanjuti tuntas	%	100	100	100	Berhasil	-
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	Berhasil	-
1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100	Berhasil	-
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	Berhasil	-
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	Berhasil	-
1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	Berhasil	-
1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	Berhasil	-
1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	15	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.4.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	100	Berhasil	-
1.4.7	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100	Berhasil	-
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	3	3	100	Berhasil	-
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
1.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	100	Berhasil	-
1.7.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38	100	Berhasil	-
1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Berhasil	-
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase data prioritas sektoral yang tersedia sesuai kaidah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
2.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah OPD Yang Memiliki Dokumen Perencanaan Baik	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
2.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
2.1.4	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
2.1.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
2.2.1	Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Menyampaikan Data Capaian Kinerja (IKU) Tepat Waktu	PD	55	55	100	Berhasil	-
2.2.2	Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terverifikasi	Data	1	1	100	Berhasil	-
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terukur	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD Yang Melaporkan Capaian Kinerja Renja PD Tepat Waktu	Laporan	10	10	100	Berhasil	-
<b>3</b>	<b>Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan RKPd, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) &gt; 85%</b>	%	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
3.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.1.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.1.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
3.1.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan (Bidang Perekonomian dan SDA) &gt; 85%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	<b>-</b>
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.2.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
3.2.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
3.2.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang SDA yang disusun	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.2.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
3.2.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							

No.	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan (Infrastruktur dan Kewilayahan) &gt; 85%</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Berhasil</b>	-
3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
3.3.3	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
3.3.4	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
3.3.5	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
3.3.6	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
3.3.7	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
3.3.8	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							

*Uraian Penjelasan Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi :*

Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan, dan solusi capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendukung faktor keberhasilan dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD kabupaten diawali dengan penyusunan dokumen ranwal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang dilaksanakan sejak Desember tahun 2022. Dokumen tersebut beserta Renstra PD akan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD. Penginputan program/kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan anggaran Renja PD dilakukan melalui SIPD Kemendagri.

Sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom up), dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari level desa/kelurahan yang dilaksanakan di bulan Juli-September 2023, kemudian dilanjutkan tingkat kecamatan yang dilaksanakan mulai minggu ke-2 bulan Februari. Tahun 2024 terverifikasi sebanyak 234 usulan hasil musrenbang kecamatan yang telah terinput dalam SIPD yang diantaranya terdapat 39 Usulan yang menjadi prioritas kecamatan.

Untuk mengakomodir masukan dari para stakeholder pembangunan daerah, maka dilaksanakan Forum konsultasi public yang hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan Ranwal RKPD maupun renja PD. Agar dokumen perencanaan PD lebih terarah, maka dilaksanakan Forum PD/lintas PD untuk dokumen perencanaan PD.

Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan politik, anggota DPRD melakukan input usulan pikir melalui SIPD paling lambat 7 hari sebelum

pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten, yang akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda serta SKPD teknis. Pokok-pokok pikiran DPRD nantinya akan disampaikan dalam pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD, yang membahas usulan hasil musrenbang kecamatan dan usulan pokir DPRD. Dokumen Rancangan RKPD yang telah mengakomodir hasil musrenbang kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rancangan akhir renja PD. Setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan, selanjutnya dokumen rancangan akhir RKPD diajukan untuk dilakukan rewiu APIP oleh inspektorat untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan. Setelah itu diajukan fasilitasi ke provinsi melalui Bappeda provinsi. Hasil fasilitasi provinsi menjadi bahan masukan dan penyempurnaan dokumen rancangan akhir RKPD. Setelah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi, selanjutnya dokumen dapat ditetapkan sebagai perkara RKPD kabupaten. Perkara RKPD paling lambat ditetapkan paling lambat akhir bulan Juni atau selambat-lambatnya 1 minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.

Keberhasilan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep sangat bergantung pada Keselarasan antar dokumen, dimana RKPD harus selaras dengan RPJMD dan RPJPD, selain itu partisipasi Pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Penyusunan RKPD mulai dari Partispai Perangkat Daerah, Masukan melalui Musrenbang serta Koordinasi dengan DPRD untuk memastikan kebijakan yang

di buat mendapat dukungan politik dan anggaran. Selain itu perlunya konsistensi dalam penyusunan dokumen RKPD, hal ini harus mencerminkan isu- isu strategis dan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada program- program prioritas yang telah termuat dalam dokumen RPJMD.

b. Penyusunan Ranwal RPJPD

Sebelum penyusunan Ranwal RPJPD, kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap RPJMD untuk periode RPJPD 20 tahun sebelumnya. Hasil evaluasi RPJMD dikonsultasikan ke provinsi untuk mendapat masukan. Hasil evaluasi RPJMD akan menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD.

Proses penyusunan RPJPD diawali dengan penentuan isu strategis yang disusun berdasarkan permasalahan dihasilkan berdasarkan survei hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD untuk periode RPJPD sebelumnya. Kemudian dari isu strategis serta visi dan misi nasional, ditetapkan visi dan misi daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Setelah itu dari setiap misi disusun arah kebijakan per 5 tahun beserta sasaran pokok dan indikator kinerja dan target capaian.

Rancangan awal yang telah disusun kemudian dikonsultasikan ke DPRD untuk mendapatkan masukan dan menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Setelah itu dilakukan konsultasi ke provinsi untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.

Keberhasilan penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten bergantung pada adanya kelaras dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yang Mengandung visi dan misi pembangunan yang strategis dan berorientasi jangka panjang, Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan mulai dari masyarakat (tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat) serta

keterlibatan lembaga pemerintah, keberhasilan penyusunan dokumen Ranwal RPJPD dengan adanya Kajian akademik yang mengidentifikasi tren pembangunan, peluang, dan tantangan dalam 20 tahun ke depan dan Analisis data statistik tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penentuan Prioritas Pembangunan yang Realistis menjadi aspek penentu keberhasilan penyusunan RPJPD ini karena harus selaras dengan dokumen RPJPN.

## 1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1.2.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

#### a. Penyusunan Data Pembangunan Daerah

Pelaksanaan penyusunan data Pembangunan Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Bupati Sumenep. Data pembangunan yang di sajikan merupakan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Bupati Sumenep. Pengumpulan data ini melalui monitoring langsung ke beberapa kecamatan untuk mendapat data potensi daerah yang kemudian di jadikan buku. Faktor keberhasilan dari penyusunan data pembangunan daerah ini, dapat dilihat dari kualitas data pembangunan, apakah sudah mencapai target yang telah di tetapkan setiap tahunnya. Data pembangunan yang telah di susun ini, selanjutnya dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

## 1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

#### - Penyusunan LKPj

Dokumen LKPj merupakan dokumen evaluasi yang disusun setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen LKPj berisi kebijakan umum pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta mencakup capaian kinerja utama daerah, kinerja ekonomi makro, kinerja perangkat daerah, kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Penyusunan LKPj ini mengompulir LKPj yang disusun oleh perangkat daerah. Selain itu LKPj juga menyajikan Realisasi kinerja APBD serta realisasi anggaran setiap Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah menyusun dokumen LKPj PD yang berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran selama satu tahun anggaran. Kemudian dokumen diupload ke dalam aplikasi "Dapur Data" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh mitra pendamping Bappeda. Dokumen LKPj PD yang telah terverifikasi akan menjadi bahan penyusunan Dokumen LKPj kepala daerah.

Berdasarkan regulasi LKPj harus diserahkan kepada DPRD Kab/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau akhir bulan maret. Dalam Pelaksanaannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep telah menyerahkan Dokumen LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep pada tanggal 07 Maret 2024, untuk kemudian dikeluarkan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir bulan maret 2024.

- Penyusunan Renja

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap 3 bulan (triwulan) setelah triwulan berakhir selambat-lambatnya 14 hari kerja. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengukur kinerja PD

dalam pelaksanaan Rencana Kerjanya untuk mencapai target yang telah di tentukan. Dalam pelaksanaannya BAPPEDA Sumenep menggunakan aplikasi SIMPEL untuk mengukur Kinerja PD per triwulan.

Laporan yang diinput PD ke dalam aplikasi SIMPEL akan menjadi bahan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap 3 bulan ke BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

#### 1.3.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

##### - Penyusunan DAK

Dalam penyusunan DAK BAPPEDA melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan OPD teknis dan BAPPENAS dalam rangka penyiapan dan penentuan Lokasi Prioritas DAK sesuai dengan tematik Tahunannya. Setelah Rapat koordinasi bersama OPD teknis dan BAPPENAS. BAPPEDA dan OPD teknis melaksanakan penginputan usulan di Aplikasi KRISNA-DAK, kemudian BAPPEDA melengkapi Laporan Realisasi Pelaksanaan DAK triwulanan sebagai kelengkapan dalam pemenuhan usulan DAK. Setelah fase penginputan usulan BAPPEDA berkoordinasi dengan OPD pengampu dalam menentukan urutan prioritas usulan. Setelah pengurutan prioritas kemudian dilaksanakan penguncian usulan (LOCK) agar usulan dapat di verifikasi oleh Provinsi dan K/L pengampu. Setelah tahap verifikasi kemudian tahap perbaikan dimana melaksanakan rapat koordinasi bersama OPD pengampu menyangkut apa saja perbaikan yang di perlukan. Setelah tahap tersebut dilakukan submit usulan agar usulan selanjutnya dapat diverifikasi oleh BAPPENAS, kemudian bappeda menyusun surat pengantar usulan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep. Setelah usulan telah di setuju maka dilaksanakan lah monitoring pelaksanaan

DAK Fisik dan NonFisik yang dilaksanakan setiap 3 bulan (triwulan) yang kemudian dilaporkan kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan BAPPENAS.

Setiap Perangkat Daerah yang mendapat anggaran DAK wajib membuat laporan kemajuan pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep. Laporan Kemajuan Pelaksanaan DAK dari PD akan dijadikan dokumen Laporan setiap 3 bulan ke BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

- Penyusunan Hibah Bansos

Laporan evaluasi capaian kegiatan hibah dan bansos disusun pada akhir tahun anggaran, yang merangkum capaian evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan hibah dan bansos.

Laporan kegiatan hibah dan bansos dari Perangkat Daerah terkait, akan dijadikan Dokumen Hibah dan Bansos setiap tahunnya.

- Penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, dan ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Bappeda melakukan evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan tugas

pembantuan/ dekonsentrasi yang dilakukan oleh SKPD pengampu dan melaporkannya ke provinsi.

Setiap Perangkat Daerah yang mendapat anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep. Laporan Kemajuan Pelaksanaan DAK dari PD akan dijadikan dokumen Laporan setiap 3 bulan ke BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketenteraman dan Ketertiban, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan Kearsipan sehingga tercapai keselarasan RKPD dengan RPJMD.
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perikanan, Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Ketenaga Kerjaan sehingga tercapai keselarasan RKPD dengan RPJMD.

2.1.3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan serta Lingkungan Hidup sehingga tercapai keselarasan RKPD dengan RPJMD.

**3.1.6. Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

Untuk keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.7  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan  
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
I	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	116,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Nilai	96,60	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Nilai	99,82	
					Nilai Komponen Pelaporan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	Laporan	100	
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program > 90%	%	100	
					Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Diproses Sesuai Ketentuan Tuntas Dan Tepat Waktu	%	100	
					Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Dikoordinasikan Dan Ditindaklanjuti Tuntas	%	100	
					Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya	%	100	
					Nilai SKM Internal	Nilai	100,90	
1.1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan > 90%	%	100	
1.1.1				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Lengkap Dan Tepat Waktu	Dokumen	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Satuan	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.1.2				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	100	
1.1.3				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	100	
1.1.4				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	100	
1.1.5				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	100	
1.1.6				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Kinerja Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Informasi Disajikan Lengkap Dan Tepat Waktu	Laporan	100	
1.1.7				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Berkala	Dokumen	100	
<b>1.2</b>				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.2.1				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengajuan pemberian gaji/tunjangan disusun sesuai ketentuan dan tersampaikan tepat waktu	%	100	
					Persentase pemberian gaji/tunjangan disalurkan tepat waktu	%	100	
1.2.2				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen pengelolaan keuangan harus disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100	
1.2.3				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan ditindaklanjuti tuntas	%	100	
<b>1.3</b>				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.3.1				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	
1.3.2				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	
<b>1.4</b>				<b>Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.4.1				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	
1.4.2				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	
1.4.3				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	
1.4.4				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	100	
1.4.5				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	
1.4.6				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Satuan	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.4.7				Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	
<b>1.5</b>				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.5.1				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	
<b>1.6</b>				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.6.1				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	100	
<b>1.7</b>				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan &gt; 90%</b>	%	<b>100</b>	
1.7.1				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	
1.7.2				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	
1.7.3				Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	100	
<b>2</b>				<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target</b>	%	<b>100</b>	
<b>2.1</b>				<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase data prioritas sektoral yang tersedia sesuai kaidah</b>	%	<b>100</b>	
2.1.1				Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah OPD Yang Memiliki Dokumen Perencanaan Baik	Dokumen	100	Menunjang
2.1.2				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
2.1.3				Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
2.1.4				Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				
2.1.5				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
<b>2.2</b>				<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	%	<b>100</b>	
2.2.1				Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Menyampaikan Data Capaian Kinerja (IKU) Tepat Waktu	PD	100	Menunjang
2.2.2				Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terverivikasi	Data	100	Menunjang
<b>2.3</b>				<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	%	<b>100</b>	
2.3.1				Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terukur	Dokumen	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Satuan	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
2.3.2				Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD Yang Melaporkan Capaian Kinerja Renja PD Tepat Waktu	Laporan	100	Menunjang
<b>3</b>				<b>Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan RKPd, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya</b>	%	<b>100</b>	
<b>3.1</b>				<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) &gt; 85%</b>	%	<b>100</b>	
3.1.1				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Dokumen	100	Menunjang
3.1.2			Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
3.1.3			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
3.1.4				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	100	Menunjang
3.1.5			Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
3.1.6			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
<b>3.2</b>				<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				
3.2.1				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Dokumen	100	Menunjang
3.2.2			Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
3.2.3			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
3.2.4				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang SDA yang disusun	Dokumen	100	Menunjang
3.2.5			Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Satuan	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3.2.6				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
<b>3.3</b>				<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan (Infrastruktur dan Kewilayahan) &gt; 85%</b>	%	<b>100</b>	
3.3.1				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Laporan	100	Menunjang
3.3.2				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				
3.3.3				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
3.3.4				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
3.3.5				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Laporan	100	Menunjang
3.3.6				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				
3.3.7				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
3.3.8				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan  
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	( % )
5	BELANJA DAERAH	10.795.792.099,00	10.104.619.815,28	93,60
5.01	BELANJA OPERASI	10.152.793.503,00	9.483.184.526,28	93,40

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	( % )
5.1.01	Belanja Pegawai	5.516.262.237,00	5.041.868.806,00	91,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.636.531.266,00	4.441.315.720,28	95,79
05:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.023.399.419,00	7.463.944.368,53	93,03
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.743.800,00	9.080.300,00	77,32
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.569.400,00	2.558.500,00	99,58
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.057.200,00	984.000,00	93,08
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	925.400,00	534.600,00	57,77
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	925.400,00	859.600,00	92,89
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	925.400,00	859.600,00	92,89
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.635.300,00	1.296.000,00	79,25
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.705.700,00	1.988.000,00	53,65
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.528.836.637,00	5.054.299.806,00	91,42
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.516.262.237,00	5.041.868.806,00	91,40
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.721.700,00	1.653.000,00	96,01
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.852.700,00	10.778.000,00	99,31
5.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.657.000,00	71.979.900,00	90,36
5.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49.657.000,00	49.100.000,00	98,88
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	22.879.900,00	76,27
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.052.641.397,00	1.021.273.052,00	97,02
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.017.961,00	20.929.000,00	99,58
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.002.004,00	66.252.000,00	82,81
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.314.289,00	260.551.000,00	99,71
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.854.690,00	16.764.000,00	99,46
5.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155.314.000,00	151.033.700,00	97,24
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.244.000,00	304.143.352,00	99,64
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	212.894.453,00	201.600.000,00	94,69
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.281.336,00	402.241.176,00	95,48
5.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.525.000,00	29.700.000,00	97,30
5.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	60.509.541,00	57.779.280,00	95,49
5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.246.795,00	314.761.896,00	95,31

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	( % )
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.304.550,00	219.903.699,00	94,66
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.304.550,00	219.903.699,00	94,66
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.934.699,00	685.166.435,53	98,31
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.927.747,00	300.712.793,00	99,93
5.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	6.660.000,00	6.600.000,00	99,10
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.186.294,00	55.087.000,00	99,82
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.160.658,00	322.766.642,53	96,59
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.745.658.968,00	1.648.130.744,00	94,41
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	932.260.674,00	862.936.732,00	92,56
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	285.645.050,00	274.370.150,00	96,05
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.258.800,00	6.352.000,00	56,42
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.203.300,00	3.630.500,00	50,40
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	30.528.900,00	9.824.500,00	32,18
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	26.094.100,00	24.373.500,00	93,41
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	571.530.524,00	544.386.082,00	95,25
5.01.02.2.02	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.660.294,00	64.652.240,00	83,25
5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55.448.494,00	47.188.840,00	85,10
5.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	22.211.800,00	17.463.400,00	78,62
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	735.738.000,00	720.541.772,00	97,93
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	81.354.200,00	74.189.520,00	91,19
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	654.383.800,00	646.352.252,00	98,77
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.026.733.712,00	992.544.702,75	96,67
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	436.930.094,00	426.843.300,00	97,69

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	( % )
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64.567.494,00	64.115.100,00	99,30
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	268.528.606,00	261.758.700,00	97,48
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.546.700,00	7.471.000,00	99,00
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.206.994,00	61.203.000,00	96,83
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.624.200,00	25.047.250,00	97,75
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.456.100,00	7.248.250,00	97,21
5.01.03.2.02	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	179.162.788,00	176.928.100,00	98,75
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.028.894,00	48.698.400,00	99,33
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.650.400,00	15.752.000,00	94,60
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.516.400,00	6.455.500,00	99,07
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.202.694,00	81.030.100,00	99,79
5.01.03.2.02.06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.227.800,00	18.527.600,00	96,36
5.01.03.2.02.07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.536.600,00	6.464.500,00	98,90
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	410.640.830,00	388.773.302,75	94,67
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.294.285,00	85.407.450,00	97,84
5.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.220.860,00	9.697.000,00	68,19
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.635.100,00	1.233.500,00	46,81
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100.980.400,00	100.404.221,75	99,43

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	( % )
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.546.535,00	79.955.821,00	91,33
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.069.200,00	10.206.000,00	72,54
5.01.03.2.03.07	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.827.300,00	1.375.000,00	48,63
5.01.03.2.03.0008	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	101.067.150,00	100.494.310,00	99,43
5.02	BELANJA MODAL	642.998.596,00	621.435.289,00	96,65
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.514.040	1.510.000	99,73
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.915.280	25.000.000,00	92,88
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	30.525.000	29.700.000	97,30
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	48.221.841	47.307.450	98,10
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.996.000	3.975.000	99,47
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.291.700	6.496.830	78,35
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.684.960	21.670.000	99,93
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	32.149.295	32.000.000	99,54
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.753.671	19.020.000	96,29
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	65.931.900	65.265.000	98,99
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.511.000	32.750.000	75,27
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	111.137.639	108.946.896	98,03
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.970.330	32.010.000	97,09
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.108.000	3.100.000	99,74
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	174.417.940	174.130.113	99,83
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.870.000	18.554.000	98,33

Tabel 3.2.2  
Laporan Operasional  
Tahun Anggaran 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>9.457.204.194,28</b>	<b>10.603.170.967,01</b>	<b>(1.145.966.772,73)</b>	<b>(10,81)</b>
<b>8,1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>9.457.204.194,28</b>	<b>10.258.763.932,00</b>	<b>(801.559.737,72)</b>	<b>(7,81)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	5.035.420.954,00	5.692.585.334,00	(657.164.380,00)	(11,54)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.939.357,00	3.233.284.336,00	(723.344.979,00)	(22,37)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.971.188.545,00	2.522.970.840,00	(551.782.295,00)	(21,87)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.894.302.145,00	2.517.037.840,00	(622.735.695,00)	(24,74)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	76.886.400,00	5.933.000,00	70.953.400,00	1.195,91
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	199.059.738,00	252.286.727,00	(53.226.989,00)	(21,10)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	195.215.418,00	252.286.727,00	(57.071.309,00)	(22,62)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.844.320,00	0,00	3.844.320,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	100.290.000,00	118.945.000,00	(18.655.000,00)	(15,68)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	100.290.000,00	118.945.000,00	(18.655.000,00)	(15,68)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	69.125.400,00	121.500.000,00	(52.374.600,00)	(43,11)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	69.125.400,00	121.500.000,00	(52.374.600,00)	(43,11)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.780.000,00	65.050.000,00	(10.270.000,00)	(15,79)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.340.000,00	64.680.000,00	(14.340.000,00)	(22,17)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.440.000,00	370.000,00	4.070.000,00	1.100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	113.337.300,00	150.199.080,00	(36.861.780,00)	(24,54)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	110.150.820,00	150.054.240,00	(39.903.420,00)	(26,59)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.186.480,00	144.840,00	3.041.640,00	2.100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.132.039,00	2.304.750,00	(172.711,00)	(7,49)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.132.039,00	2.304.750,00	(172.711,00)	(7,49)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	26.335,00	27.939,00	(1.604,00)	(5,74)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.830,00	27.927,00	(3.097,00)	(11,09)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.505,00	12,00	1.493,00	12.441,67
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.417.958.106,00	2.402.175.998,00	15.782.108,00	0,66
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	621.200.591,00	2.402.175.998,00	(1.780.975.407,00)	(74,14)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	621.200.591,00	2.402.175.998,00	(1.780.975.407,00)	(74,14)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	858.372.829,00	0,00	858.372.829,00	100,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	858.372.829,00	0,00	858.372.829,00	100,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	938.384.686,00	0,00	938.384.686,00	100,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	938.384.686,00	0,00	938.384.686,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	107.523.491,00	57.125.000,00	50.398.491,00	88,22
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	107.523.491,00	57.125.000,00	50.398.491,00	88,22
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.523.491,00	57.125.000,00	50.398.491,00	88,22
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.421.783.240,28	4.566.178.598,00	(144.395.357,72)	(3,16)
8.1.02.01	Beban Barang	663.617.310,00	491.228.065,00	172.389.245,00	35,09
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	663.617.310,00	491.228.065,00	172.389.245,00	35,09
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.526.000,00	14.861.000,00	6.665.000,00	44,85
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.215.000,00	41.406.500,00	33.808.500,00	81,65
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.315.510,00	100.468.070,00	13.847.440,00	13,78
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.103.250,00	26.631.730,00	(10.528.480,00)	(39,53)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.178.000,00	2.981.000,00	(803.000,00)	(26,94)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.136.500,00	49.446.420,00	(19.309.920,00)	(39,05)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	58.947.000,00	30.310.070,00	28.636.930,00	94,48
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.603.000,00	6.403.000,00	200.000,00	3,12
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	40.038.000,00	448.000,00	39.590.000,00	8.837,05
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	31.808.000,00	(31.808.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.760.000,00	4.641.000,00	(881.000,00)	(18,98)
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	94.627.000,00	41.015.325,00	53.611.675,00	130,71
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	185.093.050,00	134.497.700,00	50.595.350,00	37,62
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.475.000,00	6.310.250,00	(835.250,00)	(13,24)
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.511.063.950,75	3.285.634.614,00	(774.570.663,25)	(23,57)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.012.742.419,00	1.889.948.426,00	122.793.993,00	6,50
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	477.050.000,00	338.600.000,00	138.450.000,00	40,89
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	33.000.000,00	(2.500.000,00)	(7,58)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	300.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(33,33)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	32.680.000,00	(32.680.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	174.600.000,00	106.800.000,00	67.800.000,00	63,48
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.400.000,00	7.200.000,00	16.200.000,00	225,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	183.000.000,00	201.975.800,00	(18.975.800,00)	(9,40)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	250,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	32.933.700,00	32.861.550,00	72.150,00	0,22
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	99.500.000,00	269.300.000,00	(169.800.000,00)	(63,05)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	7.135.900,00	4.295.530,00	2.840.370,00	66,12
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	155.684.904,00	156.075.492,00	(390.588,00)	(0,25)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.720.000,00	15.320.000,00	400.000,00	2,61
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.550.415,00	41.389.054,00	(3.838.639,00)	(9,27)
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	29.687.500,00	18.921.000,00	10.766.500,00	56,90
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	46.750.000,00	33.411.000,00	13.339.000,00	39,92

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	46.750.000,00	33.411.000,00	13.339.000,00	39,92
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	448.491.531,75	1.197.079.450,00	(748.587.918,25)	(62,53)
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	448.491.531,75	1.197.079.450,00	(748.587.918,25)	(62,53)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.080.000,00	165.195.738,00	(162.115.738,00)	(98,14)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.080.000,00	165.195.738,00	(162.115.738,00)	(98,14)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	425.282.322,53	220.048.056,00	205.234.266,53	93,27
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326.399.793,00	220.048.056,00	106.351.737,00	48,33
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	256.720.043,00	150.827.806,00	105.892.237,00	70,21
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.992.750,00	36.441.250,00	(16.448.500,00)	(45,14)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.517.000,00	0,00	6.517.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.020.000,00	20.310.000,00	2.710.000,00	13,34
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.045.000,00	7.944.000,00	101.000,00	1,27
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	5.505.000,00	4.525.000,00	980.000,00	21,66
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98.882.529,53	0,00	98.882.529,53	100,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.882.529,53	0,00	98.882.529,53	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	821.819.657,00	569.267.863,00	252.551.794,00	44,36
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	821.819.657,00	550.035.863,00	271.783.794,00	49,41
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	772.021.157,00	492.330.863,00	279.690.294,00	56,81
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.798.500,00	57.705.000,00	(7.906.500,00)	(13,70)
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	19.232.000,00	(19.232.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	19.232.000,00	(19.232.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>9.457.204.194,28</b>	<b>10.258.763.932,00</b>	<b>(801.559.737,72)</b>	<b>(7,81)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>344.407.035,01</b>	<b>(344.407.035,01)</b>	<b>(100,00)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	305.023.206,84	(305.023.206,84)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	5.464.285,71	(5.464.285,71)	(100,00)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	5.464.285,71	(5.464.285,71)	(100,00)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	135.000,00	(135.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	135.000,00	(135.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	88.750.689,30	(88.750.689,30)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	1.349.320,00	(1.349.320,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	5.770.000,00	(5.770.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	15.713.984,30	(15.713.984,30)	(100,00)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	9.250.000,00	(9.250.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	22.615.000,00	(22.615.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	24.356.091,00	(24.356.091,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.720.000,00	(1.720.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	4.280.000,00	(4.280.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	2.496.294,00	(2.496.294,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	1.992.996,00	(1.992.996,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	858.000,00	(858.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	1.134.996,00	(1.134.996,00)	(100,00)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	268.125,00	(268.125,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	268.125,00	(268.125,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00	207.228.777,50	(207.228.777,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	177.508.960,00	(177.508.960,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	495.000,00	(495.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	29.224.817,50	(29.224.817,50)	(100,00)
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00	1.183.333,33	(1.183.333,33)	(100,00)
8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	1.183.333,33	(1.183.333,33)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	39.383.828,17	(39.383.828,17)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	39.383.828,17	(39.383.828,17)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	39.383.828,17	(39.383.828,17)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>344.407.035,01</b>	<b>(344.407.035,01)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>9.457.204.194,28</b>	<b>10.603.170.967,01</b>	<b>(1.145.966.772,73)</b>	<b>(10,81)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(9.457.204.194,28)</b>	<b>(10.603.170.967,01)</b>	<b>1.145.966.772,73</b>	<b>(10,81)</b>

**Tabel 3.2.3  
Laporan Operasional  
Tahun Anggaran 2024**

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) *}{100}$	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.795.792.099,00</b>	<b>10.104.619.815,28</b>	<b>93,60</b>	<b>10.459.893.086,00</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.152.793.503,00</b>	<b>9.483.184.526,28</b>	<b>93,40</b>	<b>10.252.095.087,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.516.262.237,00	5.041.868.806,00	91,40	5.686.137.482,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.669.863.621,00	2.516.387.209,00	94,25	3.226.836.484,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.076.038.905,00	1.977.121.545,00	95,24	2.517.037.840,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.990.431.524,00	1.894.302.145,00	95,17	2.517.037.840,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.607.381,00	82.819.400,00	96,74	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	209.312.703,00	199.059.738,00	95,10	252.286.727,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	204.980.243,00	195.215.418,00	95,24	252.286.727,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.332.460,00	3.844.320,00	88,73	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.887.302,00	100.290.000,00	77,81	118.945.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.887.302,00	100.290.000,00	77,81	118.945.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	76.216.950,00	69.125.400,00	90,70	121.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	76.216.950,00	69.125.400,00	90,70	121.500.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.066.450,00	55.150.000,00	96,64	64.680.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.094.205,00	50.340.000,00	96,63	64.680.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.972.245,00	4.810.000,00	96,74	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	119.317.895,00	113.482.140,00	95,11	150.054.240,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.306.726,00	110.150.820,00	95,53	150.054.240,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.011.169,00	3.331.320,00	83,05	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.938.416,00	2.132.039,00	72,56	2.304.750,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.938.416,00	2.132.039,00	72,56	2.304.750,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.000,00	26.347,00	31,00	27.927,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000,00	24.830,00	41,38	27.927,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25.000,00	1.517,00	6,07	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.685.198.616,00	2.417.958.106,00	90,05	2.402.175.998,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	661.436.326,00	621.200.591,00	93,92	2.402.175.998,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	661.436.326,00	621.200.591,00	93,92	2.402.175.998,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	981.582.625,00	858.372.829,00	87,45	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	981.582.625,00	858.372.829,00	87,45	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.042.179.665,00	938.384.686,00	90,04	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.042.179.665,00	938.384.686,00	90,04	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.200.000,00	107.523.491,00	66,70	57.125.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	161.200.000,00	107.523.491,00	66,70	57.125.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	161.200.000,00	107.523.491,00	66,70	57.125.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.636.531.266,00	4.441.315.720,28	95,79	4.565.957.605,00
5.1.02.01	Belanja Barang	752.844.482,00	663.617.310,00	88,15	491.228.065,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	752.844.482,00	663.617.310,00	88,15	491.228.065,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.674.926,00	21.526.000,00	99,31	14.861.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.723.947,00	75.215.000,00	85,74	41.406.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	139.364.850,00	114.315.510,00	82,03	100.468.070,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	32.810.170,00	16.103.250,00	49,08	26.631.730,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.479.400,00	2.178.000,00	87,84	2.981.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.485.764,00	30.136.500,00	87,39	49.446.420,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	58.955.191,00	58.947.000,00	99,99	30.310.070,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.608.052,00	6.603.000,00	99,92	6.403.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	40.539.016,00	40.038.000,00	98,76	448.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	31.808.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.769.560,00	3.760.000,00	99,75	4.641.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	94.705.200,00	94.627.000,00	99,92	41.015.325,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.914.200,00	185.093.050,00	86,53	134.497.700,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.157.206,00	5.475.000,00	88,92	6.310.250,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.657.000,00	9.600.000,00	99,41	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.602.663.312,00	2.530.596.430,75	97,23	3.282.013.621,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.095.688.312,00	2.032.274.899,00	96,97	1.886.327.433,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	501.650.000,00	477.050.000,00	95,10	338.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	30.500.000,00	92,42	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	700.000,00	300.000,00	42,86	450.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	32.680.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	174.600.000,00	174.600.000,00	100,00	106.800.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	2.880.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	184.255.104,00	183.000.000,00	99,32	201.975.800,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.045.282,00	36.000.000,00	99,87	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	540.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	54.030.188,00	42.000.000,00	77,73	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.030.188,00	24.000.000,00	99,87	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	99.900.000,00	99.600.000,00	99,70	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	33.300.000,00	32.933.700,00	98,90	32.861.550,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	269.300.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.198.800,00	0,00	0,00	64.050,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.021.750,00	7.505.000,00	62,43	4.096.090,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	171.756.000,00	171.399.064,00	99,79	152.650.939,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.634.000,00	15.720.000,00	80,07	15.320.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	47.328.000,00	40.999.635,00	86,63	41.328.004,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	35.259.000,00	29.687.500,00	84,20	18.921.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.800.000,00	46.750.000,00	99,89	33.411.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	46.800.000,00	46.750.000,00	99,89	33.411.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	450.000.000,00	448.491.531,75	99,66	1.197.079.450,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	450.000.000,00	448.491.531,75	99,66	1.197.079.450,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.175.000,00	3.080.000,00	30,27	165.195.738,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.175.000,00	3.080.000,00	30,27	165.195.738,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	436.306.272,00	425.282.322,53	97,47	223.448.056,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326.728.759,00	326.399.793,00	99,90	223.448.056,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	256.842.634,00	256.720.043,00	99,95	150.827.806,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	Bermotor Penumpang				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.054.925,00	19.992.750,00	99,69	36.441.250,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.526.800,00	6.517.000,00	99,85	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.660.000,00	6.600.000,00	99,10	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.021.400,00	23.020.000,00	99,99	20.310.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.103.000,00	8.045.000,00	99,28	11.344.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.520.000,00	5.505.000,00	99,73	4.525.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.577.513,00	98.882.529,53	90,24	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	109.577.513,00	98.882.529,53	90,24	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	844.717.200,00	821.819.657,00	97,29	569.267.863,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	844.717.200,00	821.819.657,00	97,29	550.035.863,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	787.106.000,00	772.021.157,00	98,08	492.330.863,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.611.200,00	49.798.500,00	86,44	57.705.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	19.232.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa* <sup>6</sup> Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	19.232.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>10.152.793.503,00</b>	<b>9.483.184.526,28</b>	<b>93,40</b>	<b>10.252.095.087,00</b>
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>642.998.596,00</b>	<b>621.435.289,00</b>	<b>96,65</b>	<b>207.797.999,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.710.656,00	428.751.176,00	95,34	27.800.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	30.525.000,00	29.700.000,00	97,30	20.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30.525.000,00	29.700.000,00	97,30	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	30.525.000,00	29.700.000,00	97,30	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	162.526.787,00	156.979.280,00	96,59	7.800.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	48.600.240,00	46.670.000,00	96,03	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.915.280,00	25.000.000,00	92,88	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.684.960,00	21.670.000,00	99,93	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.634.847,00	103.812.450,00	98,27	7.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	48.221.841,00	47.307.450,00	98,10	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	32.149.295,00	32.000.000,00	99,54	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.263.711,00	24.505.000,00	97,00	7.800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.291.700,00	6.496.830,00	78,35	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.291.700,00	6.496.830,00	78,35	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	109.442.900,00	98.015.000,00	89,56	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	65.931.900,00	65.265.000,00	98,99	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	65.931.900,00	65.265.000,00	98,99	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	43.511.000,00	32.750.000,00	75,27	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.511.000,00	32.750.000,00	75,27	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	147.215.969,00	144.056.896,00	97,85	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	111.137.639,00	108.946.896,00	98,03	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	111.137.639,00	108.946.896,00	98,03	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	36.078.330,00	35.110.000,00	97,32	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.970.330,00	32.010.000,00	97,09	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.108.000,00	3.100.000,00	99,74	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.417.940,00	174.130.113,00	99,83	179.997.999,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	174.417.940,00	174.130.113,00	99,83	179.997.999,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	174.417.940,00	174.130.113,00	99,83	179.997.999,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	174.417.940,00	174.130.113,00	99,83	179.997.999,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.870.000,00	18.554.000,00	98,33	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.870.000,00	18.554.000,00	98,33	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	18.870.000,00	18.554.000,00	98,33	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.870.000,00	18.554.000,00	98,33	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>642.998.596,00</b>	<b>621.435.289,00</b>	<b>96,65</b>	<b>207.797.999,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.795.792.099,00</b>	<b>10.104.619.815,28</b>	<b>93,60</b>	<b>10.459.893.086,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(10.795.792.099,00)</b>	<b>(10.104.619.815,28)</b>	<b>93,60</b>	<b>(10.459.893.086,00)</b>

*Uraian Penjelasan Realisasi Anggaran:*

- Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibanding Pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00. Realisasi Total Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00.
- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 10.795.792.099,00 Meningkatkan sebesar Rp. 551.888.074,00 atau 4,86% dibanding Belanja Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 11.347.680.173,00 Realisasi Total Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.104.619.815,28 atau 93,60% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 691.172.283,72.
  - Belanja Operasi  
Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 10.152.793.503,00 terealisasi sebesar Rp. 9.483.184.526,28 atau sebesar 93,40% sehingga masih terdapat sisa target sebesar Rp. 669.608.976,72.
  - Belanja Modal  
Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 642.998.596,00 terealisasi sebesar Rp. 621.435.289,00 atau sebesar 96,65% sehingga terdapat sisa target sebesar Rp. 21.563.307,00.
  - Belanja Tidak Terduga  
Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00% sehingga masih terdapat sisa target sebesar Rp. 0,00.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

➤ Hambatan dan kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

- Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang;
- Masih kurang respon SKPD terhadap pentingnya kebutuhan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
- Belum ada standar baku terhadap tahapan penyusunan data mulaidari proses pengumpulan sampai dengan pengolahan dan publikasi data.

➤ Solusi

Untuk mengatasi hambatan dan kendala ini adalah :

- Melakukan peningkatan SDM baik masyarakat maupun aparat serta pelibatan lebih banyak unsur-unsur di luar pemerintah seperti tokoh-tokoh masyarakat dan LSM dalam proses perencanaan;
- Meningkatkan pemahaman aparat tentang pentingnya data, sehingga kedepan data yang disajikan oleh masing-masing SKPD adalah data yang valid dan berkualitas;

Perlu disusun SOP berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait tahapan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memudahkan SKPD dalam menyusun data hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

### **3.3. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome)	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
						Target	Realisasi	(%)	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)	
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)	%	90	90.90	101	8.023.399.419	7.463.944.368	93,03	7,97
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target	%	100	100	100	1.745.658.968	1.648.130.744	94,41	5,59
			Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya	%	100	100	100	1.026.733.712	992.544.702	96,67	3,33

*Uraian Penjelasan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sumenep terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep) dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 93,03%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 7,97%;
2. Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 94,41%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 5,59%;
3. Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 96,67%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 3,33%;

# LAMPIRAN :

- 1. SK. Tim SAKIP Perangkat Daerah**
- 2. Matriks RENSTRA**
- 3. SK. Penetapan Indikator Kinerja Utama**
- 4. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah 2025**
- 5. SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja**
- 6. Catatan Hasil Reviu LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2025**
- 7. Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Reviu LKjIP Tahun Anggaran 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. (0328) 666923  
**SUMENEP**

Kode Pos 69416

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR: 188/ 010 /435.202/2025**

**TENTANG**  
**TIM INTERNAL**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**  
**TAHUN 2025**

**Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan membentuk Tim Internal Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Pertama : Membentuk Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  2. Penyusunan Rencana Strategis;
  3. Rencana Kinerja Tahunan;
  4. Perjanjian Kinerja Tahunan;
  5. Laporan Kerja Instansi Pemerintah;
  6. Rencana Aksi Kinerja Tahunan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**



**Dr. Ir. ARIF FIRMANO, S.TP., M.Si., IPU.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN SUMENEP  
 Nomor : 188/ 010 /435.202/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM INTERNAL  
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
 DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMENEP  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggungjawab	Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep
II	Ketua	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumenep
III	Sekretaris	
-	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan	<p>- <i>Perjanjian Kinerja Tahunan</i> :            membuat perjanjian kinerja pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dengan melalui perjanjian kinerja untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>- <i>Laporan Kerja Instansi Pemerintah</i> :            menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Pimpinan Lembaga.</p>
IV	Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Penyusunan Indikator Kinerja Utama</i> : mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara ke-

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		seluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran <i>exact</i> , melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.
-	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Penyusunan Rencana Strategis :</i> mengevaluasi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif
-	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<i>Rencana Kinerja Tahunan :</i> mengevaluasi kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
-	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Rencana Aksi Kinerja Tahunan :</i> mengevaluasi menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi

Ditetapkan di Sumenep  
Pada tanggal: 6 Januari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Sumenep dari tahun 2022-2026 kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 (T-C.25)  
*Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Penilaian AKIP: • Perencanaan Kinerja (30,00) • Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6,00) • Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading ) pada setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9,00) • Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15,00)	25,00	25,00	25,00	25,50	25,50	
1.			Indeks Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% capaian sasaran pemkab + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	80,10%	80,15%	80,25%	80,50%	80,75%	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923  
**SUMENEP**

Kode Pos 69416

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/ 436 /435.202/2024**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 21 Mei 2024

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**



**ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..
4. Indikator Kinerja Utama :
  1. Nilai Perencanaan Kinerja (*ULTIMATE OUTCOME*);
  2. Indeks Perencanaan (*INTERMEDIATE OUTCOME*);
  3. Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target (*IMMEDIATE OUTCOME*);
  4. Persentase keselarasan RKPd, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya (*IMMEDIATE OUTCOME*);
  5. Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA (*INTERMEDIATE OUTCOME*);
  6. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (*IMMEDIATE OUTCOME*).

**TABEL**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME		IMMEDIATE OUTCOME		FORMULA	KET
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah	Nilai Perencanaan Kinerja					<b>Penilaian AKIP:</b> • Perencanaan Kinerja (30,00) - Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6,00) - Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) pada setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9,00) - Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15,00)	
1.1.			Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan			Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% Capaian sasaran Pemkab + 20% Capaian program Perangkat Daerah	
1.1.1.					Meningkatnya Capaian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target	$\frac{\text{Capaian IKU sesuai dengan target}}{\text{Target Capaian IKU}} \times 100\%$	
1.1.2.					Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya	$\frac{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja}}{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD}} \times 100\%$	
1.2.			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA			$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja semua indikator selain indikator rata-rata capaian kinerja}}{\text{Jumlah indikator selain indikator rata-rata capaian kinerja}} \times 100\%$	

NO	ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME		IMMEDIATE OUTCOME		FORMULA	KET
1.2.1.					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	$\frac{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	

Ditetapkan di : Sumenep  
 Pada tanggal : 21 Mei 2024


**KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN SUMENEP**  
**ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19780518 200501 1 010



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila target kinerja dimaksud tidak tercapai karena bukan faktor eksternal, maka kami bersedia dimutasi.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**BUPATI SUMENEP**

**Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**

**Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah	1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja	25,50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.	Indeks Perencanaan	80,50%
2.	<b>Kinerja Tambahan Pendukung Sasaran Strategis :</b>			
	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	-	Nilai SAKIP	92
	b. Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah $\geq$ 90%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.787.253.049,57	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.680.285.250,00	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	989.205.000,00	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>11.456.743.299,57</b>	

Sumenep, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**BUPATI SUMENEP**



**Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**




**Dr. Ir. ARIE FIRMAN TO, S.TP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	: 000.8.3/416.1/203.1/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 6 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	: 7 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	: 8 Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	 <b>KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP</b> <b>ARIE FIRMANITO, S.TP., M.SI.</b> S. Perikta Utama Muda NIP. 19780518 200501 1 010
<b>DASAR HUKUM :</b>	NAMA SOP	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami Perencanaan dan Pendanaan</li><li>- Memahami Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li></ul>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li></ol>		

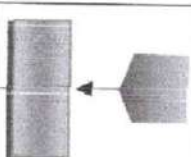



<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
<p>Apabila koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dilakukan, maka akan tidak berhasil target kinerja yang diperoleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra</li> <li>- Renja/RKT</li> <li>- RKAD/PA</li> <li>- Perjanjian Kinerja/Pakta Integritas</li> <li>- Monev. Berkala</li> <li>- Laporan Kinerja</li> </ul>

**Penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**










NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					PERSYARATAN	MUTU BAKU		
		PELAKSANA	KASUBBAG. PROGRAM	KABID	SEKRETARIS	KEPALA		WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Penyusunan Konsep Draft Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Undangan rapat penyusunan Renstra	30 menit	Daftar undangan rapat	
2.	Rapat Draft Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, dst	6 jam X 4 kali rapat	Draft Renstra sesuai dengan peraturan yang berlaku	
3.	Draft Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep diketik oleh staf Pelaksana						Hasil akhir kerangka Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep	1 hari	Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep	
4.	Penandatanganan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Dokumen Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep	10 menit	Dokumen Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep ditandatangani	
5.	Penyusunan Draft IKU (Indikator Kinerja Utama) BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Undangan rapat penyusunan IKU	30 menit	Daftar undangan rapat	
6.	Rapat Draft IKU (Indikator Kinerja Utama) BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/II-M.PAN/5/2007	6 jam X 3 kali rapat	Draft IKU sesuai dengan peraturan yang berlaku	
7.	Draft IKU (Indikator Kinerja Utama) BAPPEDA Kabupaten Sumenep diketik oleh staf						Hasil akhir kerangka IKU BAPPEDA Kabupaten Sumenep	1 hari	IKU BAPPEDA Kabupaten Sumenep	
8.	Penandatanganan Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Dokumen Penetapan IKU BAPPEDA Kabupaten Sumenep	10 menit	Dokumen Penetapan IKU BAPPEDA Kabupaten Sumenep ditandatangani	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		PELAKSANA	KASUBBAG. PROGRAM	KABID	SEKRETARIS	KEPALA				
9.	Penyusunan Draft Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Undangan rapat penyusunan Renja/RKT	30 menit	Daftar undangan rapat	
10.	Rapat Draft Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, dst	6 jam X 3 kali rapat	Draft Renja/RKT sesuai dengan peraturan yang berlaku	
11.	Draft Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep diketik oleh staf Pelaksana						Hasil akhir kerangka Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep	1 hari	Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep	
12.	Penandatanganan Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Dokumen Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep	10 menit	Dokumen Penetapan Renja/RKT BAPPEDA Kabupaten Sumenep ditandatangani	
13.	Penyusunan Draft RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Undangan rapat penyusunan RKA	30 menit	Daftar undangan rapat	
14.	Rapat Draft RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, dst	6 jam	Draft RKA sesuai dengan peraturan yang berlaku	
15.	Draft RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep diketik oleh staf Pelaksana						Hasil akhir kerangka RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep	1 hari	RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep	
16.	Penandatanganan RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Dokumen RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep	30 menit	Dokumen Penetapan RKA BAPPEDA Kabupaten Sumenep ditandatangani	












NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PELAKSANA	KASUBBAG. PROGRAM	KABID	SEKRETARIS	KEPALA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KE
24.	Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Laporan Kinerja Pejabat Pengawas dilaporkan ke Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Perjanjian Kinerja Tahunan berdasarkan IKI (Indikator Kinerja Individu) yang dicapai	2 hari	Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Laporan Kinerja Pejabat Pengawas	
25.	Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) BAPPEDA Kabupaten Sumenep						Berdasarkan Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Laporan Kinerja Pejabat Pengawas	3 hari	Laporan LKjIP	
26.	Penandatanganan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai target kinerja yang diperoleh	10 menit	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	

## Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PELAKSANA	KASUBBAG. PROGRAM	KABID	SEKRETARIS	KEPALA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1.	Menerima disposisi Kepala tentang Surat Edaran Penyusunan LKjIP						Surat Edaran dari Sekda	15 menit	Undangan rakor internal penyusunan LKjIP		
2.	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian meminta data						Undangan rakor internal penyusunan LKjIP	420 menit	Data LKjIP dari bidang-bidang		
3.	Menerima data dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian						Data LKjIP dari bidang-bidang	2.100 menit	Rekap data LKjIP dari bidang-bidang		
4.	Memverifikasi dan mengolah data						Rekap data LKjIP dari bidang-bidang	5.880 menit	Draft LKjIP		
5.	Mengoreksi dan memaraf LKjIP						Draft LKjIP	45 menit	LKjIP		
6.	Menandatangani LKjIP						LKjIP	20 menit	Dokumen LKjIP		
7.	Menerima LKjIP yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Sub Bagian Perencanaan untuk digandakan, diarsip dan dikirim ke instansi terkait						Dokumen LKjIP	1.260 menit	Dokumen LKjIP		

## Penyusunan LKPJ Bappeda

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		PELAKSANA	KASUBBAG. PROGRAM	KABID	SEKRETARIS	KEPALA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1.	Memberikan perintah kepada Staf untuk mengumpulkan data pendukung penyusunan dokumen LKPJ Bappeda						data pendukung	90 menit	data pendukung		
2.	Menerima, melaksanakan perintah mengumpulkan data pendukung penyusunan dokumen LKPJ Bappeda						data pendukung	4 hari	data pendukung		
3.	Menerima, menyediakan konsep dan menyusun rancangan dokumen dokumen LKPJ Bappeda						rancangan konsep LKPJ Bappeda	3 hari	rancangan konsep LKPJ Bappeda		
4.	Menerima, mengkoreksi dan menganalisa rancangan dokumen LKPJ Bappeda						rancangan konsep LKPJ Bappeda	1 hari	rancangan konsep LKPJ Bappeda		
5.	Menerima hasil koreksi rancangan dokumen LKPJ Bappeda, serta memerintahkan Staf untuk mengetik konsep Laporan Tahunan Bappeda						rancangan konsep LKPJ Bappeda	1 hari	rancangan konsep LKPJ Bappeda		
6.	Mengetik dokumen LKPJ Bappeda						rancangan konsep LKPJ Bappeda	1 hari	rancangan konsep LKPJ Bappeda		
7.	Menerima, membaca dan mengkoreksi dokumen LKPJ Bappeda						dokumen LKPJ Bappeda	1 hari	dokumen LKPJ Bappeda		
8.	Menerima, membaca dan memparaf dokumen LKPJ Bappeda						dokumen LKPJ Bappeda	1 hari	dokumen LKPJ Bappeda		
9.	Menerima, menelaah dan mengkoreksi serta menandatangani dokumen LKPJ Bappeda						dokumen LKPJ Bappeda	1 hari	dokumen LKPJ Bappeda		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080  
E-mail : inspektoratsumenep@yahoo.co.id  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sumenep, 27 Februari 2025

**PIK INSPEKTUR DAERAH**  
  
**NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680325 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080

email : [jks\\_inspektorat@sumenepkab.go.id](mailto:jks_inspektorat@sumenepkab.go.id) website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**CATATAN HASIL REVIU LKJIP**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**TAHUN 2025**

<b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP</b>	<b>Disusun Oleh</b>	Novitasari, S.T., M.T
	<b>Tanggal</b>	25 Februari 2024
	<b>Diteliti Oleh</b>	Eko Andre Yulianto, SH, MM
	<b>Tanggal</b>	25 Agustus 2024
	<b>Disetujui Oleh</b>	Kristian Handono, S.Sos
	<b>Tanggal</b>	26 Agustus 2024

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/57/060.3/2025 tanggal 4 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviu LKjIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

**DATA UMUM**

Perubahan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Renja Tahun 2024 yang tertuang dalam LKjIP Tabel 2.9 sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3	4	5
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Komponen Perencanaan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>27,95 (Nilai Perencanaan SAKIP)</b>	<b>8.023.399.419</b>
1		<b>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>27,05 (Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP)</b>	
1.1		<b>Nilai Komponen Pelaporan SAKIP PD (BAPPEDA Kabupaten Sumenep)</b>	<b>14 (Nilai Pelaporan SAKIP)</b>	

		<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program &gt; 90%</b>	<b>95%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program &gt; 90%</b>	<b>95%</b>	<b>11.743.800</b>
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Disusun Sesuai Sistematika/Pedoman, Lengkap Dan Tepat Waktu	7 Dokumen	2.569.400
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.057.200
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			925.400
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			925.400
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			925.400
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.635.300
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.705.700
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Diproses Sesuai Ketentuan Tuntas Dan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>5.528.836.637</b>
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Dikoordinasikan Dan Ditindaklanjuti Tuntas</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengajuan pemberian gaji/tunjangan disusun sesuai ketentuan dan tersampaikan tepat waktu	100%	5.516.262.237
		Persentase pemberian gaji/tunjangan disalurkan tepat waktu	100%	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen pengelolaan keuangan harus disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	1.721.700
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan ditindaklanjuti tuntas	100%	10.852.700

<b>1.3</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>79.657.000</b>
1	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Pengajuan Kenaikan Pangkat/Pensiun Disusun Sesuai Ketentuan Dan Tersampaikan Tepat Waktu	100%	49.657.000
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>1.052.641.397</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan SKM Per Triwulan/Semester	4 Laporan	21.017.961
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.002.004
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			261.314.289
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.854.690
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			155.314.000
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			305.244.000
7	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			212.894.453
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya</b>	<b>100%</b>	<b>421.281.336</b>
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.525.000
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel			60.509.541
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			330.246.795
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SKM Internal</b>	<b>87 (Nilai SKM)</b>	<b>232.304.550</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan SKM Per Triwulan/Semester	4 Laporan	232.304.550
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Keberadaan Aset Sesuai Dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dan Berfungsi Sebagaimana Mestinya</b>	<b>100%</b>	<b>696.934.699</b>
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB)	4 Dokumen	300.927.747

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Persentase Aset Terinfentarisir Dalam KIB	100%	6.660.000
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Yang Memerlukan Pemeliharaan/Perawatan Dilakukan Sebagaimana Mestinya	100%	55.186.294
4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			334.160.658
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>1.745.658.968</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>932.260.674</b>
1	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah OPD Yang Memiliki Dokumen Perencanaan Baik	3 Dokumen	11.258.800
2	Sub Kegiatan :Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			7.203.300
3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			30.528.900
4	Sub Kegiatan :Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			26.094.100
5	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			571.530.524
6	Sub Kegiatan :Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			285.645.050
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase data prioritas sektoral yang tersedia sesuai kaidah</b>	<b>100%</b>	<b>77.660.294</b>
1	Sub Kegiatan :Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Menyampaikan Data Capaian Kinerja (IKU) Tepat Waktu	55 PD	55.448.494
2	Sub Kegiatan :Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terverifikasi	1 Data	22.211.800
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>735.738.000</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data Prioritas Kabupaten Yang Terukur	4 Dokumen (Renja)	81.354.200
2	Sub Kegiatan :Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD Yang Melaporkan Capaian Kinerja Renja PD Tepat Waktu	10 Laporan	654.383.800
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan RKPd, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian</b>	<b>100%</b>	<b>1.026.763.712</b>

		Lainnya		
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>436.960.094</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	64.597.494
2	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	1 Dokumen	268.528.606
3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			7.546.700
4	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			63.206.994
5	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			25.624.200
6	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			7.456.100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>179.162.788</b>
1	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen	49.028.894
2	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang disusun	1 Dokumen	16.650.400
3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			6.516.400
4	Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			81.202.694

5	Sub Kegiatan :Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam			19.227.800
6	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam			6.536.600
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>&gt; 85%</b>	<b>410.640.830</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	87.294.285
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	1 Dokumen	14.220.860
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2.635.100
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			100.980.400
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			87.546.535
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			14.069.200
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			2.827.300
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			101.067.150

## Uraian Hasil Reviu Dokumen LKjIP

### 1. Format

Dokumen LKjIP telah disusun dengan format laporan sebagai berikut :

- Pada Bab I dokumen LKjIP telah membahas tentang penjelasan umum organisasi terkait dengan tugas, kewajiban dan fungsi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
  - Pada Bab II dokumen LKjIP telah memuat ringkasan ikhtisar perencanaan kinerja mulai dari Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja serta Perjanjian Kinerja Perubahan.
  - Pada Bab III dokumen LKjIP telah menyajikan akuntabilitas kinerja organisasi berupa data/informasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut juga telah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
    - a) Perbandingan antara target, realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun 2024
    - b) Perbandingan antara target, realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun 2024 dengan 2 tahun terakhir
    - c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
    - d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi
    - e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan
    - f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Disamping itu pada Bab III dokumen LKjIP juga telah memuat terkait realisasi anggaran tahun 2024 dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.
- Pada Bab IV dokumen LKjIP telah menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi termasuk juga ketidaktercapaian target kinerja yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

## 2. Mekanisme Penyusunan

Dokumen LKjIP Tahun 2024 secara umum telah disusun dengan mekanisme yang cukup memadai untuk menghasilkan laporan kinerja yang kredibel, namun masih terdapat catatan yang perlu dilengkapi sebagai berikut :

- a. Dokumen LKjIP Tahun 2024 telah disusun oleh Tim Internal SAKIP berdasarkan SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung data yang memadai, namun masih terdapat kekurangan bahwa belum dilakukan uraian atau deskripsi atas Rencana Kerja Tahun 2024 secara jelas dan utuh atas perencanaan selama setahun, serta Rencana Kerja Tahun 2024 yang diuraikan pada Bab II dokumen LKjIP semestinya perlu dilakukan validasi dengan melampirkan Dokumen RKT 2024 yang telah disahkan khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja serta Perjanjian Kinerja sudah dicantumkan namun belum dilengkapi penjelasan serta uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan.

- c. Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang yang dikompilir oleh Kasubbag Program dan Perencanaan, namun pada LKjIP belum terdapat lampiran SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja.
- d. Telah ditetapkan penanggungjawab atas pelaksanaan pengumpulan data/informasi dari masing-masing bidang berdasarkan SK Tim SAKIP Internal dan SOP
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP dapat diyakini keandalannya karena sebagian besar telah didukung dengan sumber data pendukung.
- f. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh masing-masing bidang hal ini dapat dilihat dari proses pengumpulan data kinerja pada dokumen SOP namun perlu dilakukan review secara berkala untuk mengetahui apakah sudah sesuai dan efektif serta memastikan target sesuai yang diharapkan.

### 3. Substansi

- a. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP tidak selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena terdapat penyesuaian pokin dan Perkin OPD hasil asistensi dengan Tim Kemenpan RB pada Tahun 2024 sementara dokumen Renstra telah disusun dan ditetapkan lebih awal dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan pohon kinerja (Pokin).
- b. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah.
- c. Tujuan dan sasaran pada LKjIP telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Indikator Kinerja dan telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).
- d. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dilengkapi dengan Definisi operasional dan formulasi/rumus perhitungan
- e. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas indikator sasaran strategis pada perangkat daerah dan sudah ditampilkan dalam tabel perhitungan. Namun belum semua dilengkapi dengan penjelasan atas target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah yaitu :
  - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target, realisasi dan persentase capaian kinerja, dengan ulasan sebagai berikut :
  - 1) Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran strategis pada Badan Perencana Pembangunan Daerah telah dilakukan (Tabel 3.1.2), namun belum didukung dengan penjelasan atas tampilan data yang disajikan dalam tabel terkait dengan target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024.

Selain itu belum dilakukan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisasi sebesar 93,49.

- 2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Belum terdapat penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel, karena terdapat perubahan indikator kinerja yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

Belum dilengkapi dengan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan.

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk tahun 2023, namun belum dilakukan perbandingan atas realisasi kinerja untuk tahun 2024 serta belum dilengkapi dengan penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan

Sudah dilakukan uraian atas data yang tercantum dalam tabel, namun masih belum dapat memberikan gambaran atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

## **B. REKOMENDASI**

Atas hasil revidu yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Menambahkan :

- a. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja agar dijadikan lampiran pada dokumen LKjIP Tahun 2024

- b. Penjelasan/ uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan. (*catatan 2. mekanisme penyusunan huruf b*).
2. Menambahkan dokumen SOP Pengumpulan/ Penyusunan Laporan Kinerja pada lampiran dokumen LKjIP sebagai bukti validasi bahwa telah terdapat mekanisme pengumpulan data/informasi dalam penyusunan LKjIP. (*catatan 3. mekanisme penyusunan huruf c*).
3. Memberikan penjelasan terkait target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja atas indikator sasaran strategi pada beberapa perangkat daerah yaitu (*catatan 3. substansi huruf e*) :
  - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Melakukan perbaikan pada Bab III yaitu dengan
  - a. Menambahkan penjelasan/ uraian atas target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024 tabel 3.1.2. Selain itu data kinerja perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut yaitu Pada Tabel 3.1.2 Capaian IKU, diberikan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisaasi sebesar 93,49. (*catatan 3. substansi huruh f. 1*))
  - b. Menambahkan deskripsi/ penjelasan pada tabel 3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terkait perubahan indikator kinerja sebagaimana hasil penyesuaian dokumen Pohon Kinerja OPD yang mengakibatkan data perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan (*catatan 3. substansi huruh f. 2*)
  - c. Menambahkan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan (*catatan substansi huruh f. 3*)
  - d. Menambahkan uraian atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan (*catatan substansi huruh f. 5*)

Sumenep, 25 Februari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Dr. Ir. ARIF FIRMANTO., S.TP., M.Si., IPU.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780518 200501 1 010

**PENGENDALI TEKNIS**

**EKO ANDRI YULIANTO, SH.,MM.**

Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19760715 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080  
email : [jks\\_inspektorat@sumenepkab.go.id](mailto:jks_inspektorat@sumenepkab.go.id), website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT REVIU LKJIP  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah ditindaklanjuti Hasil Reviu LKjIP **Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep** Tahun Anggaran 2024.

Adapun catatan reviu dan tindak lanjut perbaikan dokumen LKjIP sebagai berikut :

1. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung data yang memadai, namun masih terdapat kekurangan bahwa belum dilakukan uraian atau deskripsi atas Rencana Kerja Tahun 2024 secara jelas dan utuh atas perencanaan selama setahun, serta Rencana Kerja Tahun 2024 yang diuraikan pada Bab II dokumen LKjIP semestinya perlu dilakukan validasi dengan melampirkan Dokumen RKT 2024 yang telah disahkan khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja serta Perjanjian Kinerja sudah dicantumkan namun belum dilengkapi penjelasan serta uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan.

***Rekomendasi Tindak Lanjut :***

1. Menambahkan ;
  - a. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja agar dijadikan lampiran pada dokumen LKjIP Tahun 2024
  - b. Penjelasan/ uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan. (*catatan 2. mekanisme penyusunan huruf b pada Catatan Hasil Reviu*).
2. Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang yang dikompilir oleh Kasubbag Program dan Perencanaan, namun pada LKjIP belum terdapat lampiran SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja

***Rekomendasi Tindak Lanjut :***

Menambahkan dokumen SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja pada lampiran dokumen LKjIP sebagai bukti validasi bahwa telah terdapat mekanisme pengumpulan data/informasi dalam penyusunan LKjIP. (*catatan 3. mekanisme penyusunan huruf c pada Catatan Hasil Reviu*).

3. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas indikator sasaran strategis pada perangkat daerah dan sudah ditampilkan dalam tabel perhitungan. Namun belum semua dilengkapi dengan penjelasan atas target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah yaitu :
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

***Rekomendasi Tindak Lanjut :***

Memberikan penjelasan terkait target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja atas indikator sasaran strategi pada beberapa perangkat daerah yaitu (*catatan 3. substansi huruf e pada Catatan Hasil Reviu*) :

- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target, realisasi dan persentase capaian kinerja, dengan ulasan sebagai berikut :
- 1) Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran strategis pada Badan Perencana Pembangunan Daerah telah dilakukan (Tabel 3.1.2), namun belum didukung dengan penjelasan atas tampilan data yang disajikan dalam tabel terkait dengan target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024.
- Selain itu belum dilakukan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar

116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisaasi sebesar 93,49.

- 2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Belum terdapat penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel, karena terdapat perubahan indikator kinerja yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

Belum dilengkapi dengan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan.

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk tahun 2023, namun belum dilakukan perbandingan atas realisasi kinerja untuk tahun 2024 serta belum dilengkapi dengan penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan

Sudah dilakukan uraian atas data yang tercantum dalam tabel, namun masih belum dapat memberikan gambaran atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

**Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Melakukan perbaikan pada Bab III yaitu dengan

- a. Menambahkan penjelasan/ uraian atas target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024 tabel 3.1.2.

Selain itu data kinerja perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut yaitu Pada Tabel 3.1.2 Capaian IKU, diberikan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisaasi sebesar 93,49. (*catatan 3. substansi huruh f. 1*))

- b. Menambahkan deskripsi/ penjelasan pada tabel 3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terkait perubahan indikator kinerja sebagaimana hasil penyesuaian dokumen Pohon Kinerja OPD yang mengakibatkan data perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan (*catatan 3. substansi huruh f. 2*)

- c. Menambahkan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan (*catatan substansi huruh f. 3*)

- d. Menambahkan uraian atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan (*catatan substansi huruh f. 5*)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**



**Dr. Ir. ARIF FIRMANO., S.TP., M.Si., IPU.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780518 200501 1 010

**TIM REVIU :**

1. **KRISTIAN HANDONO, S.Sos**  
NIP. 19820202 200604 1 019
2. **EKO ANDRI YULIANTO, SH, MM**  
NIP. 19760715 201001 1 001
3. **NOVITA SARI, ST, MT**  
NIP. 19821108 200901 2 003
4. **FARI SETIA KURNIYAWAN S, SE**  
NIP. 19890421 201503 1 003
5. **ERVINA WULANDARI A., S.T.**  
NIP. 19900411 202012 2 002
6. **TOTON MERIANTO, S.A.N., M.Ak.**  
NIP. 19810919 200604 1 022

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members, with horizontal lines drawn under each name.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080

email : [jks\\_inspektorat@sumenepkab.go.id](mailto:jks_inspektorat@sumenepkab.go.id), website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

---

**LAPORAN HASIL REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

**NOMOR : X.700.1.2.1/308/060.3/2025**

**TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080

email : [jks\\_inspektorat@sumenepkab.go.id](mailto:jks_inspektorat@sumenepkab.go.id), website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

---

Sumenep, 28 Februari 2025

Nomor : X.700.1.2.1/308/060.3/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu LKjIP  
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Yth. .Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sumenep  
di  
**SUMENEP**

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/57/ST/060.3/2025, tanggal 04 Februari 2025 untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sumenep Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah penelaahan terhadap:

1. Format;
2. Mekanisme penyusunan; dan
3. Substansi.

d. Metodologi

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan evaluasi data;
2. Wawancara.

## II. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil pengujian terbatas atas reviu LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Format

Dokumen LKjIP telah disusun dengan format laporan sebagai berikut :

- Pada Bab I dokumen LKjIP telah membahas tentang penjelasan umum organisasi terkait dengan tugas, kewajiban dan fungsi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
  - Pada Bab II dokumen LKjIP telah memuat ringkasan ikhtisar perencanaan kinerja mulai dari Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja serta Perjanjian Kinerja Perubahan.
  - Pada Bab III dokumen LKjIP telah menyajikan akuntabilitas kinerja organisasi berupa data/informasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut juga telah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
    - a) Perbandingan antara target, realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun 2024
    - b) Perbandingan antara target, realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun 2024 dengan 2 tahun terakhir
    - c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
    - d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi
    - e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan
    - f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Disamping itu pada Bab III dokumen LKjIP juga telah memuat terkait realisasi anggaran tahun 2024 dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.
- Pada Bab IV dokumen LKjIP telah menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi termasuk juga ketidaktercapaian target kinerja yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

## 2. Mekanisme Penyusunan

Dokumen LKjIP Tahun 2024 secara umum telah disusun dengan mekanisme yang cukup memadai untuk menghasilkan laporan kinerja yang kredibel, namun masih terdapat catatan yang perlu dilengkapi sebagai berikut :

- a. Dokumen LKjIP Tahun 2024 telah disusun oleh Tim Internal SAKIP berdasarkan SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung data yang memadai, namun masih terdapat kekurangan bahwa belum dilakukan uraian atau deskripsi atas Rencana Kerja Tahun 2024 secara jelas dan utuh atas perencanaan selama setahun, serta Rencana Kerja Tahun 2024 yang diuraikan pada Bab II dokumen LKjIP semestinya perlu dilakukan validasi dengan melampirkan Dokumen RKT 2024 yang telah disahkan khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan target kerjanya.

Perjanjian Kinerja serta Perjanjian Kinerja sudah dicantumkan namun belum dilengkapi penjelasan serta uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan.

- c. Berdasarkan hasil wawancara telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang yang dikompulir oleh Kasubbag Program dan Perencanaan, namun pada LKjIP belum terdapat lampiran SOP Pengumpulan/Penyusunan Laporan Kinerja.
- d. Telah ditetapkan penanggungjawab atas pelaksanaan pengumpulan data/informasi dari masing-masing bidang berdasarkan SK Tim SAKIP Internal dan SOP
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP dapat diyakini keandalannya karena sebagian besar telah didukung dengan sumber data pendukung.
- f. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh masing-masing bidang hal ini dapat dilihat dari proses pengumpulan data kinerja pada dokumen SOP namun perlu dilakukan review secara berkala untuk mengetahui apakah sudah sesuai dan efektif serta memastikan target sesuai yang diharapkan.

### 3. Substansi

- a. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP tidak selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena terdapat penyesuaian pokin dan Perkin OPD hasil asistensi dengan Tim Kemenpan RB pada Tahun 2024 sementara dokumen Renstra telah disusun dan ditetapkan lebih awal dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan pohon kinerja (Pokin).
- b. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah.
- c. Tujuan dan sasaran pada LKjIP telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Indikator Kinerja dan telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).
- d. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dilengkapi dengan Definisi operasional dan formulasi/rumus perhitungan
- e. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas indikator sasaran strategis pada perangkat daerah dan sudah ditampilkan dalam tabel perhitungan. Namun belum semua dilengkapi dengan penjelasan atas target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah yaitu :
  - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan target, realisasi dan persentase capaian kinerja, dengan ulasan sebagai berikut :
  - 1) Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran strategis pada Badan Perencana Pembangunan Daerah telah dilakukan (Tabel 3.1.2), namun belum didukung dengan penjelasan atas tampilan data yang disajikan dalam tabel terkait dengan target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024.

Selain itu belum dilakukan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisasi sebesar 93,49.

- 2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Belum terdapat penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel, karena terdapat perubahan indikator kinerja yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

Belum dilengkapi dengan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan.

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk tahun 2023, namun belum dilakukan perbandingan atas realisasi kinerja untuk tahun 2024 serta belum dilengkapi dengan penjelasan atas data yang disajikan dalam tabel.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan
- Sudah dilakukan uraian atas data yang tercantum dalam tabel, namun masih belum dapat memberikan gambaran atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

## **B. REKOMENDASI**

Atas hasil revidu yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Menambahkan :
  - a. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 khususnya pada bab pembahasan Tujuan/Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja agar dijadikan lampiran pada dokumen LKjIP Tahun 2024

- b. Penjelasan/ uraian atas perubahan yang dilakukan atas indikator serta target serta kronologis ataupun penyebab atas perubahan yang dilakukan. (*catatan 2. mekanisme penyusunan huruf b*).
2. Menambahkan dokumen SOP Pengumpulan/ Penyusunan Laporan Kinerja pada lampiran dokumen LKjIP sebagai bukti validasi bahwa telah terdapat mekanisme pengumpulan data/informasi dalam penyusunan LKjIP. (*catatan 3. mekanisme penyusunan huruf c*).
3. Memberikan penjelasan terkait target kinerja realisasi kinerja maupun perhitungan capaian kinerja atas indikator sasaran strategi pada beberapa perangkat daerah yaitu (*catatan 3. substansi huruf e*) :
  - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Melakukan perbaikan pada Bab III yaitu dengan
  - a. Menambahkan penjelasan/ uraian atas target kinerja yang ditetapkan, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2024 tabel 3.1.2. Selain itu data kinerja perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut yaitu Pada Tabel 3.1.2 Capaian IKU, diberikan penjelasan terkait kondisi atau penyebab atas capaian kinerja yang melebihi 100% khususnya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 116,50% dari target sebesar 80,25 dan realisasi sebesar 93,49. (*catatan 3. substansi huruf f. 1*))
  - b. Menambahkan deskripsi/ penjelasan pada tabel 3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terkait perubahan indikator kinerja sebagaimana hasil penyesuaian dokumen Pohon Kinerja OPD yang mengakibatkan data perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan (*catatan 3. substansi huruf f. 2*)
  - c. Menambahkan uraian singkat (simpulan) atas data tabel yang disajikan (*catatan substansi huruf f. 3*)

- d. Menambahkan uraian atas faktor penyebab keberhasilan yang membuat capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan (*catatan substansi huruh f. 5*)

Demikian laporan hasil reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



**Plt. INSPEKTUR DAERAH**

**NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680325 199003 1 005

**Tembusan :**

Yth. Bapak Bupati Sumenep  
(sebagai laporan)